

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

LKjIP 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025. LKjIP Tahun 2025 ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025. yaitu: “Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil Dan Sejahtera”.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Hasil pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Temanggung, Februari 2026
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Temanggung



Gotri Wijianto Wuriatmojo, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197712121997031006

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| Halaman Sampul | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iv |
| Daftar Tabel | v |
| Daftar Gb. | vi |
| Daftar Lampiran | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Gb.an Umum Perangkat Daerah | 1 |
| B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP | 5 |
| C. Sistematika Penyajian | 6 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 7 |
| A. Visi Misi | 7 |
| B. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan | 11 |
| C. Indikator Kinerja | 22 |
| D. Rencana Anggaran Tahun 2025 | 24 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 26 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 26 |
| B. Realisasi Anggaran | 103 |
| C. Prestasi dan Penghargaan | 106 |
| BAB IV PENUTUP | 109 |
| A. Tinjauan Umum Capaian Perangkat Daerah | 109 |
| B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang | 110 |
| Lampiran-1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 | |
| Lampiran-2 Laporan Capaian IKPD Tahun 2025 | |
| Lampiran-3 Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025 | |
| Lampiran-4 Prestasi Perangkat Daerah | |
| Lampiran-5 Rencana Aksi Perangkat Daerah Cascading Kinerja Pohon Kinerja | |

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan/Ruang Pegawai
- Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi
- Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/Sasaran
- Tabel 2.3 Indikator Kinerja Dinkominfo Kabupaten Temanggung
- Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Tabel 3.2 Predikat Indeks SPB
- Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tujuan Dinkominfo Tahun 2025
- Tabel 3.4 Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2025
- Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja SPBE Tahun 2025 Terhadap Tahun Sebelumnya
- Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja SPBE Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah dan Kementerian Kominfo
- Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran 1
- Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Indeks Layanan SPBE Tahun 2025 Terhadap Tahun 2024
- Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran 2
- Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Indeks Tata Kelola SPBE Tahun 2025 Terhadap Tahun 2024
- Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran 3
- Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dengan Tahun 2024
- Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran 4
- Tabel 3.14 Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
- Tabel 3.15 Nilai AKIP Perangkat Daerah
- Tabel 3.16 Capaian Kinerja Program 1 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- Tabel 3.17 Persentase Lembaga Binaan dan Mitra Diseminasi Informasi Dinkominfo Yang Aktif
- Tabel 3.18 Persentase Terselenggaranya Diseminasi Informasi melalui Kanal Media Elektronik dan Non Elektronik

- Tabel 3.19 Persentase Penanganan Laporan dan Aduan Masyarakat Melalui Kanal Aduan Dinkominfo
- Tabel 3.20 Persentase Badan Publik Yang Memenuhi Standar Tata Kelola dan Layanan Informasi Komunikasi Publik
- Tabel 3.21 Capaian Kinerja Program 2 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- Tabel 3.22 Persentase Layanan Publik Secara Elektronik
- Tabel 3.23 Persentase Kinerja Infrastruktur TIK yang Baik
- Tabel 3.24 Persentase Kinerja Infrastruktur TIK yang Baik
- Tabel 3.25 Capaian Kinerja Program 3 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- Tabel 3.26 Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)
- Tabel 3.27 Ketersediaan Data Statistik Sektoral
- Tabel 3.28 Capaian Kinerja Program 4 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- Tabel 3.29 Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
- Tabel 3.30 Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah
- Tabel 3.31 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025
- Tabel 3.32 Capaian Indikator Program dari sisi anggaran

DAFTAR GB.

- Gb. 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinkominfo Kab. Temanggung
- Gb. 3.1 Master Plan e-Government Kabupaten Temanggung
- Gb. 3.2 Pengolahan Data Tim SPBE
- Gb. 3.3 Pemeliharaan Data Center
- Gb. 3.4 Pemasangan Jaringan Fiber Optic (FO)
- Gb. 3.5 Tangkapan Layar Sistem Informasi Kepegawaian
- Gb. 3.6 Tangkapan Layar Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (srikandi)
- Gb. 3.7 Tangkapan Layar Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA)
- Gb. 3.8 Tangkapan Layar Aplikasi Layanan Digital Smart Village Kab. Temanggung
- Gb. 3.9 Tangkapan Layar Aplikasi Layanan Sistem Informasi Desa Digital (SIDEDI)
- Gb. 3.10 Tangkapan Layar Layanan Data PPID Pemerintah Desa
- Gb. 3.11 Menu List menuju beberapa aplikasi yang digunakan oleh desa/kelurahan
- Gb. 3.12 Tampilan Informasi Rekap APBDES tiap desa bisa difilter sesuai tahun, kode posting, kecamatan dan desa
- Gb. 3.13 Tampilan halaman depan website Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten
- Gb. 3.14 Halaman login Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
- Gb. 3.15 Penanganan insiden siber di ruang kontrol
- Gb. 3.16 Analisis ip address pada serangan siber yang masuk
- Gb. 3.17 Pengecekan konektivitas jaringan internet
- Gb. 3.18 Migrasi dan instalasi server pencadangan (backup) di Data Center
- Gb. 3.19 Penggantian Access point untuk wifi publik di area Plaza Temanggung
- Gb. 3.20 Pemasangan Access point untuk wifi publik di area Taman Pengayoman
- Gb. 3.21 Forum "Satu Data" Untuk Pemeriksaan Kualitas Data
- Gb. 3.22 Audit TIK (Infrastruktur & Aplikasi)
- Gb. 3.23 Kegiatan Bimtek Aplikasi si Dedi untuk Desa penerima pokir tahun 2025
- Gb. 3.24 Penerimaan Penghargaan KIP Award Tahun 2025

- Gb. 3.25 Penerimaan Penghargaan Lomba Pertunjukan FK Metra Tahun 2025 Tingkat Provinsi Jawa Tengah
- Gb. 3.26 Host Podcast “Kepoin Yuk” Interview
- Gb. 3.27 Tim Produksi Konten Bidang Informasi Komunikasi Publik
- Gb. 3.28 Tim Media Center Melaksanakan Pengambilan Gb.
- Gb. 3.29 Program “Lebih Dekat” di Radio eRTe FM
- Gb. 3.30 Publikasi dan Diseminasi Program Kebijakan Melalui Videotron
- Gb. 3.31 Publikasi dan Diseminasi Program Kebijakan Melalui Media Luar Ruang Baliho
- Gb. 3.32 Nilai SKM Dinkominfo Temanggung
- Gb. 3.33 Grafik Nilai SKM Dinkominfo Temanggung Per Unsur
- Gb. 3.34 Hasil Evaluasi AKIP Dinkominfo Temanggung Tahun 2025
- Gb. 3.35 Tim teknis Podcast “Kepoin Yuk” sedang mempersiapkan sarana prasarana kebutuhan tapping
- Gb. 3.36 Liputan berita pada acara kunjungan kerja Kepala Daerah
- Gb. 3.37 Tim produksi konten tengah melaksanakan editing video
- Gb. 3.38 Kunjungan Kerja dari LPPL Batik TV Pekalongan ke LPPL Temanggung TV
- Gb. 3.39 Konsolidasi dan Koordinasi Dinkominfo kepada Karyawan LPPL Temanggung TV
- Gb. 3.40 Kunjungan Kerja LPPL Radio Kutai Kartanegara ke Radio eRTe FM
- Gb. 3.41 Program School Visit eRTe FM
- Gb. 3.42 Edukasi Pemanfaatan Teknologi dan Media Sosial Secara Positif kepada para Pelajar
- Gb. 3.43 Edukasi kepada Komunitas Masyarakat Terkait Optimalisasi Media Digital
- Gb. 3.44 Bimtek dan Workshop Jurnalistik dan Pengelolaan Media kepada Kelompok Ilmiah Remaja di Sekolah-sekolah
- Gb. 3.45 Sosialisasi Program INCAKAP (Internet Cerdas Kreatif Produktif) di Sekolah Menengah Pertama, Seminggu Sekali
- Gb. 3.46 Bimtek dan Workshop Produksi Konten dan Pengelolaan Media Digital kepada Pelaku UMKM
- Gb. 3.47 Bimtek dan Workshop Produksi Konten dan Pengelolaan Media Digital kepada Mahasiswa KKN

- Gb. 3.48 Halaman beranda SIDEDI (Sistem Desa Digital)
- Gb. 3.49 Tampilan Integrasi berbagai peta tematik dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data spasial serta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
- Gb. 3.50 Tampilan daftar potensi desa dalam format grid foto pada aplikasi SIDEDI (Sistem Desa Digital)
- Gb. 3.51 Tampilan halaman berita desa dalam format grid pada aplikasi SIDEDI (Sistem Desa Digital)
- Gb. 3.52 Tampilan list stok darah PMI sesuai dengan golongannya
- Gb. 3.53 Maintenance perangkat jaringan di Data Center Pemkab
- Gb. 3.54 Pemasangan Access point untuk wifi publik di area Taman Pengayoman
- Gb. 3.55 Perbaikan jaringan fiber optik
- Gb. 3.56 Kegiatan pemasangan Access point untuk wifi publik di area Alun-alun Temanggung
- Gb. 3.57 Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung dengan laman data.temanggungkab.go.id
- Gb. 3.58 Front end portal SDI Kabupaten Temanggung yang berisi kumpulan data dan Produsen Data
- Gb. 3.59 Buku Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2025
- Gb. 3.60 Front end geoportal Kabupaten Temanggung
- Gb. 3.61 Tampilan E-Statistik, aplikasi berbasis android yang dapat diunduh melalui Play Store
- Gb. 3.62 Pembinaan Statistik Sektorial kepada perangkat daerah yang dilakukan Dinkominfo bekerjasama dengan BPS Kabupaten Temanggung
- Gb. 3.63 Sosialisasi dan Pendampingan Penerbitan TTE di Dikpora
- Gb. 3.64 Sosialisasi dan pendampingan Penerbitan TTE PPPK Paruh waktu Dinas Pekerjaan Umum
- Gb. 3.65 Bimbingan Teknis bagi anggota CSIRT Temanggungkab yang berasal dari 46 Perangkat Daerah dan Kecamatan
- Gb. 3.66 Dashboard score indeks KAMi versi 5.0.
- Gb. 3.67 Pengisian dan penilaian Indeks KAMI secara mandiri
- Gb. 3.68 Laporan Hasil Uji Vulnerability Assesment (VA)
- Gb. 3.69 Screenshoot email yang terenkripsi dengan email sanapati

- Gb. 3.70 Laporan bulanan rekapitulasi penerimaan dan pengiriman berita Persandian
- Gb. 3.71 Bupati Temanggung menerima penghargaan dalam ajang “Smart City Award” Tahun 2025 dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Republik Indonesia di Yogyakarta, tanggal 26/8/2025
- Gb. 3.72 Piagam Penghargaan “Smart City Award” Tahun 2025
- Gb. 3.73 Penerimaan Penghargaan KIP Award Tahun 2025
- Gb. 3.74 Penerimaan Penghargaan Lomba Pertunjukan FK Metra Tahun 2025 Tingkat Provinsi Jawa Tengah
- Gb. 3.75 Piagam Penghargaan Lomba Pertunjukan FK Metra Tahun 2025
- Gb. 3.76 Penghargaan Juara Harapan III kategori Film Pendek Program Diseminasi Informasi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)
- Gb. 3.77 KPID Award 2025 sebagai LPPL dengan Kelembagaan Terbaik. dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Laporan Capaian IKPD Tahun 2025
3. Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025
4. Prestasi Perangkat Daerah Tahun 2025
5. Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2025
6. Laporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Sasaran TW IV
7. Cascading Kinerja
8. Pohon Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinkominfo sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disingkat Dinkominfo Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Tugas pokok Dinkominfo adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinkominfo menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- e. penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- f. layanan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah sesuai peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik;
- g. pemberdayaan dan kemitraan dengan *stakeholder* dan masyarakat dalam diseminasi informasi;
- h. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah;
- i. pengelolaan *e-Government* di lingkup pemerintah daerah;
- j. pemasangan dan pemeliharaan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi pemerintah daerah;
- k. penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah;
- l. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
- m. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;

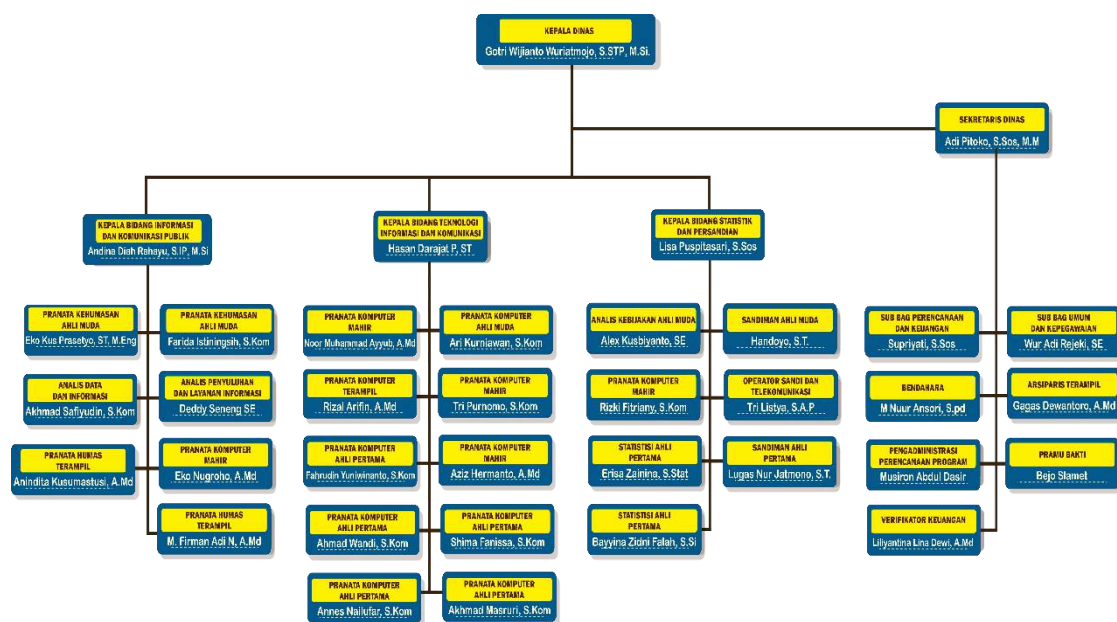
- n. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian pemerintah daerah;
- o. pengendalian teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- q. penyelenggaraan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangannya;
- r. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinkominfo Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, yang membawahi 2 sub bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Bidang, yang masing-masing dibantu oleh 2 Sub Koordinator:
 - 1) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dibantu oleh:
 - a) Sub Koordinator Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik; dan
 - b) Sub. Koordinator Pemberdayaan dan Kemitraan Informasi Komunikasi Publik;
 - 2) Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dibantu oleh:
 - a) Sub Koordinator Infrastruktur dan Jaringan;
 - b) Sub Koordinator Pengembangan dan Layanan Aplikasi Informatika.
 - 3) Kepala Bidang Statistik dan Persandian dibantu oleh:
 - a) Sub Koordinator Statistik;
 - b) Sub Koordinator Persandian dan Keamanan Informasi.

Struktur Organisasi Dinkominfo Kabupaten Temanggung digambarkan dalam bentuk bagan sebagaimana gambar sebagai berikut:



Gb.1.1

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinkominfo Kab. Temanggung

Jumlah pegawai pada Dinkominfo Kabupaten Temanggung saat ini sebanyak 91 orang terdiri dari 35 orang ASN dan 56 orang tenaga pendukung. Adapun pegawai Dinkominfo berstatus ASN jika ditinjau dari berbagai klasifikasi dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 1.1
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan/Ruang Pegawai

| No | Uraian | | Jumlah | Keterangan |
|----|------------------------|----------------------|---------|------------|
| | | | Pegawai | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1 | Kualifikasi Pendidikan | | | |
| | a. | SD | 1 | |
| | b. | SMP | 0 | |
| | c. | SLTA | 2 | |
| | d. | Sarjana Muda (D-III) | 7 | |
| | e. | S-1 dan D-IV | 21 | |
| | f. | S-2 | 4 | |
| | g. | S-3 | - | |
| | Jumlah | | 35 | |

| No | Uraian | | Jumlah | Keterangan |
|----|---------------------------|---------------------------|---------|------------|
| | | | Pegawai | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 2 | Pangkat/Golongan | | | |
| | a | Gol I | 1 | |
| | b | Gol II | 7 | |
| | c | Gol III | 20 | |
| | d | Gol IV | 2 | |
| | e | PPPK | 5 | |
| | Jumlah | | 35 | |
| 3 | Jabatan/Eselon/Fungsional | | | |
| | a | Eselon II | 1 | |
| | b | Eselon III | 4 | |
| | c | Eselon IV | 2 | |
| | d | Eselon V | - | |
| | e | Jabatan Fungsional Khusus | 22 | |
| | f | Jabatan Fungsional Umum | 6 | |
| | Jumlah | | 35 | |

4. Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi Dinkominfo Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah:

- 1) Belum optimalnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- 2) Belum optimalnya sistem keamanan informasi;
- 3) Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah;
- 4) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- 5) Belum optimalnya pengelolaan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik;
- 6) Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral dan data spasial.

B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- 5) Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/28 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung 2025-2029.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan:

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Dinkominfo yang telah dan seharusnya dicapai.
- 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinkominfo untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun.
- 2) Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah.

C. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

| | |
|---------|-----------------------|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA |
| BAB IV | PENUTUP |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi Misi

Visi dan misi Kabupaten Temanggung periode 2025-2029 merupakan komitmen strategis untuk meletakkan fondasi transformasi menuju Temanggung yang Berbudaya, Maju, dan Sejahtera. Visi ini bukan sekadar cita-cita administratif, melainkan sebuah manifestasi dari semangat "Temanggung Untuk Semua", (*Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif dan Aman*) yang memastikan bahwa derap pembangunan dapat dirasakan secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Untuk mewujudkan Visi tersebut selanjutnya dijabarkan lebih luas melalui misi-misi strategis yang saling terintegrasi sebagai berikut:

Misi Pertama,

Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas.

Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan hal mendasar bagi pembangunan suatu kabupaten, tidak terkecuali Kabupaten Temanggung. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi tetapi juga menjamin keadilan sosial dengan menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan layanan dan peluang penting. Selain itu, perbaikan konektivitas infrastruktur juga akan meningkatkan akses masyarakat pada layanan pendidikan dan layanan kesehatan, meningkatkan pariwisata, dan meningkatkan aktivitas ekonomi warga. Selain itu, konektivitas juga terkait dengan penyediaan dan perluasan infrastruktur digital, untuk memastikan semua masyarakat, terutama di daerah pedesaan, memiliki akses dalam mendapat informasi, layanan, serta mengembangkan peluang baru dari ekonomi digital.

Misi Kedua,

Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil.

Memprioritaskan diversifikasi ekonomi dan peningkatan mata pencaharian di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk menciptakan perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini akan mengurangi tingkat ketergantungan pada satu sektor, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan menerapkan

diversifikasi ekonomi, Temanggung dapat membangun masa depan yang lebih seimbang dan sejahtera bagi seluruh penduduknya, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dengan mendorong diversifikasi ekonomi, mendukung usaha kecil, dan memberikan pelatihan keterampilan baru, memastikan peluang kerja yang stabil dan bervariasi bagi semua orang.

Misi Ketiga,

Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan.

Memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mendukung diversifikasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, mendorong kelestarian lingkungan, memperkuat tata kelola, dan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Dengan berinvestasi pada pendidikan, keterampilan, dan kemampuan masyarakatnya, Temanggung dapat membangun masyarakat yang tangguh, dinamis, dan sejahtera serta mampu menghadapi tantangan dan peluang masa depan. Berikutnya, pemerintah daerah wajib memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat Temanggung agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

Misi Keempat,

Mempromosikan Kelestarian Lingkungan.

Mengutamakan kelestarian lingkungan di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, dan memenuhi tujuan keberlanjutan nasional dan global. Dengan menerapkan praktik berkelanjutan, Kabupaten Temanggung dapat melindungi dan memulihkan lingkungan, menciptakan masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan sehat serta siap menghadapi tantangan dan peluang masa depan.

Misi Kelima,

Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif.

Memprioritaskan tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan kelembagaan di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, memfasilitasi pembangunan yang efektif dan inklusif, memperkuat kinerja perekonomian, memastikan supremasi hukum, mendorong kohesi sosial, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan efisiensi kelembagaan, dan mendorong inovasi dan daya tanggap. Pada era kemajuan teknologi informasi saat ini, pemerintah daerah dapat memanfaatkan partisipasi masyarakat melalui media sosial untuk memberikan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberikan penilaian atas upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian, Dinkominfo Kabupaten Temanggung memegang mandat strategis dalam menopang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di era modern. Dinkominfo sepenuhnya mendukung visi pembangunan daerah dengan mendukung **Misi Kelima** yaitu "*Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif.*"

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Dinkominfo mengemban peran krusial sebagai pilar utama dalam akselerasi transformasi digital. Peran ini diimplementasikan melalui penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang merata hingga ke tingkat desa, guna memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat dapat merasakan kemudahan akses layanan publik. Digitalisasi birokrasi melalui optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bukan sekadar peralihan media, melainkan sebuah upaya sistematis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

Sejalan dengan prinsip inklusivitas, Dinkominfo juga bertindak sebagai garda terdepan dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Dengan mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), instansi memastikan bahwa setiap kebijakan dan hasil pembangunan tersampaikan secara akurat dan akuntabel kepada masyarakat. Lebih lanjut, melalui fungsi statistik sektoral dan

persandian, Dinkominfo menjamin kedaulatan data daerah melalui penyediaan data yang berkualitas serta perlindungan keamanan informasi siber yang handal. Sinergi seluruh aspek ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang kondusif bagi peningkatan kesejahteraan dan daya saing Kabupaten Temanggung di masa depan.

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan Dinkominfo Kabupaten Temanggung disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| VISI : Temanggung Untuk Semua | | | | |
|--|--|--|--|--|
| MISI : Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif | | | | |
| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik berbasis teknologi informasi | Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Digital | 1. Pengembangan sistem informasi terintegrasi 2. Digitalisasi data (<i>super app</i>) |
| | Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Peningkatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1. Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur TIK 2. Pemanfaatan cloud server 3. Pemerataan jaringan internet |
| | | | Peningkatan keamanan teknologi komunikasi dan informasi | 1. Peningkatan Indeks Keamanan Informasi 2. Penerapan teknologi keamanan informasi (<i>firewalls, anti-virus, dan enkripsi data</i>) |
| | Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah | Nilai keterbukaan informasi publik | Peningkatan layanan informasi publik | 1. Penguatan sistem layanan pengaduan dan konsultasi masyarakat 2. Pemanfaatan teknologi digital 3. Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat 4. Penguatan Unit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) |
| | | | Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM statistik, 2. Perbaiki proses kerja dan sistem koordinasi dan kolaborasi yang kuat antar instansi |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--------|---|---|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah | Peningkatan kualitas pelayanan publik | Penerapan dan pengembangan inovasi pelayanan publik |
| | | Nilai AKIP Perangkat Daerah | Penguatan akuntabilitas kinerja | Peningkatan kualitas perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja |

Sumber : Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

B. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level dibawahnya. Cascading kinerja menjabarkan secara jelas dan logis dan memiliki keterkaitan sebab akibat serta memiliki keterkaitan sinergitas.

Pada tabel berikut disajikan cascading kinerja terkait Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinkominfo Tahun 2025-2029.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

| Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Keterangan |
|---|--|--|--|--|---|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik | Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik berbasis teknologi informasi | Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | | |
| | | | | | Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | | |
| | | | | | Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah | 2.16.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 2.16.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | Tersusunnya dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | | Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |

| Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Keterangan |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--|--|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| | | | | Terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 2.16.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | |
| | | | | Tersedianya sarana dan prasarana administrasi | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Keterangan |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--|--|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| | | | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | |
| | | | | | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 2.16.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| | | | | Tersedianya jasa pelayanan perkantoran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Keterangan |
|-------------------------------------|--------|---------|---|---|--|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | | | | Terpeliharanya Sarana dan prasarana perkantoran | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |
| | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan publik | | Persentase layanan publik secara elektronik | 2.16.03 - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | |
| | | | | | Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik | 2.16.03 - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | |
| | | | | | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet | 2.16.03 - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | |
| | | | Meningkatnya pelayanan publik, memastikan akses informasi yang mudah, dan | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | 2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di | |

| Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Keterangan |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---|--|--|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | memperkuat identitas digital pemerintah daerah | | Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | 2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | |
| | | | | Meningkatnya penerapan dan pemanfaatan sistem E-Government secara optimal di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung | Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali | 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas | 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | 2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | |
| | | | | | Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali | 2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas | 2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | |

| Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Keterangan |
|-------------------------------------|--------|--|---|---|--|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | | |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan publik | | Persentase layanan publik secara elektronik | 2.16.03 - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | |
| | | | | | Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik | 2.16.03 - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | |
| | | | | | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet | 2.16.03 - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | |
| | | | Meningkatnya pelayanan publik, memastikan akses informasi yang mudah, dan memperkuat identitas digital pemerintah daerah | Meningkatnya pelayanan publik, memastikan akses informasi yang mudah, dan memperkuat identitas digital pemerintah daerah | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | 2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | 2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | |
| | | | Meningkatnya penerapan dan pemanfaatan sistem E-Government secara optimal di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung | Meningkatnya penerapan dan pemanfaatan sistem E-Government secara optimal di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung | Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali | 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas | 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan | 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |

| Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Keterangan |
|-------------------------------------|--------|---------|--|---|---|---|------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | | | | | Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | |
| | | | | | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | 2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | |
| | | | | | Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali | 2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah | |
| | | | | | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas | 2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | |
| | | | Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah | | Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah | 2.21.02 - Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | |
| | | | | Terselenggaranya pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian | 2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | |
| | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan | 2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi | |

| Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Keterangan | | |
|-------------------------------------|--------|---|---|--------|---|---|---|--|--|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | | |
| | | | | | Layanan Keamanan Informasi dan Persandian | dan Persandian Pemerintah Daerah | | | |
| | | Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah | Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | | Nilai keterbukaan informasi publik | | | | |
| | | | | | Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | 2.16.02 - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | | | |
| | | | | | Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | 2.16.02 - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | | | |
| | | | | | Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | 2.16.02 - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | | | |
| | | | | | Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | 2.16.02 - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | | | |
| | | | | | Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi komunikasi publik yang bermanfaat bagi masyarakat | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan | 2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | |
| | | | | | | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | 2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | |
| | | | | | | Persentase khalayak yang terpapar informasi publik | 2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | |
| | | | | | | Persentase khalayak yang terpapar informasi public | 2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi | | |
| | | | | | | | | | |

| Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Keterangan | |
|-------------------------------------|--------|---------|--|--|---|---|--|--|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | |
| | | | | | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | 2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | |
| | | | | | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan | 2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | | |
| | | | Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi, dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN) | | Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI) | 2.20.02 - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | | |
| | | | | | Ketersediaan data statistik sektoral | 2.20.02 - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | | |
| | | | | Tersedianya Data Statistik Sektoral Kabupaten Temanggung | | Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. | 2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral | 2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | | | Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. | 2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral | |
| | | | | | | Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral | 2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar | |
| | | | | | | | | |

C. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Dinkominfo Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator Kinerja Dinkominfo berdasarkan level koordinasi beserta target kinerja selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Dinkominfo Kabupaten Temanggung

| No | Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program | Indikator | Satuan | Target Kinerja Pada Tahun Ke- | | | | | Ket. |
|----|---|---|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Tujuan: Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik berbasis teknologi informasi | Indeks SPBE | Indeks | 3,70 | 3,75 | 3,80 | 3,85 | 3,90 | |
| 2 | Sasaran 1: Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks layanan SPBE | Nilai | 4,50 | 4,60 | 4,70 | 4,75 | 4,80 | |
| 3 | Sasaran 2: Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks tata kelola SPBE | Nilai | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | |
| 4 | Sasaran 3: Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | Nilai | 96,00 | 96,50 | 97,00 | 97,50 | 98,00 | |
| 5 | Sasaran 4: Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah | Angka | 79,90 | 82,30 | 83,30 | 84,30 | 85,30 | |
| | | Nilai AKIP Perangkat Daerah | Angka | 74,75 | 75,25 | 75,5 | 75,75 | 76,00 | |

| No | Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program | Indikator | Satuan | Target Kinerja Pada Tahun Ke- | | | | | Ket. |
|----|---|--|--------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Sasaran Program 1: Terwujudnya pengelolaan dan layanan informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat dan valid | Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif | Persen | 40,00 | 85,75 | 86,00 | 86,25 | 86,5 | |
| | | Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo | Persen | 90,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik | Persen | 15,00 | 17,50 | 20,00 | 22,50 | 25,00 | |
| 7 | Sasaran Program 2: Terselenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi | Persentase layanan publik secara elektronik | Persen | 55,00 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 100 | |
| | | Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik | Persen | 100 | 37,68 | 66,67 | 100 | 100 | Perubahan formulasi (rumus untuk target tahun 2025) |
| | | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet | Persen | 91,00 | 91,50 | 92,00 | 92,50 | 93,00 | |
| 8 | Sasaran Program 3: Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi, dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN) | Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI) | Angka | 40,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | |
| | | Ketersediaan Data Statistik Sektor | Persen | 74,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

| No | Tujuan/Sasaran/ Sasaran Program | Indikator | Satuan | Target Kinerja Pada Tahun Ke- | | | | | Ket. |
|----|---|---|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Sasaran Program 4: Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah | Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah | Angka | 300 | 300 | 320 | 340 | 360 | |
| | | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

D. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinkominfo Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2025 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Jumlah pagu anggaran dalam dokumen Perubahan Renja dan DPA Dinkominfo Tahun 2025 setelah dilakukan beberapa kali penyesuaian adalah sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------------|
| 1. Pada Dokumen Rencana Kerja (Renja) | Rp. | 9.391.351.489,- |
| 2. Pada DPA Perubahan | Rp. | 9.244.399.952,- |
| 3. Setelah dilakukan penyesuaian gaji | Rp. | 9.244.399.952,- |

Secara rinci Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 9.244.399.952,- pada masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 7.170.370.502,-
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Rp 559.768.450,-
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Rp 1.129.479.500,-
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Rp 9.901.500,-
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Rp 374.880.000,-.

Penyaluran anggaran tersebut mencerminkan komitmen Dinkominfo Kabupaten Temanggung dalam mempercepat transformasi digital dan memperkuat keterbukaan informasi publik. Dengan alokasi terbesar pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, fokus utama tetap terjaga pada stabilitas operasional internal dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran.

Sementara itu, investasi signifikan pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik diarahkan untuk memperluas jangkauan layanan digital bagi masyarakat serta memastikan diseminasi kebijakan daerah berjalan lebih interaktif dan transparan. Dukungan anggaran untuk Statistik Sektoral dan Persandian juga menjadi fondasi krusial dalam mewujudkan tata kelola data yang akurat serta sistem keamanan informasi yang tangguh terhadap ancaman siber. Secara keseluruhan, struktur APBD 2025 ini dirancang untuk menciptakan ekosistem pemerintahan berbasis elektronik yang efisien, aman, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Temanggung.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang menopang pemerintahan menuju *good governance* sehingga mampu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja; dan atau
2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin tingginya kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Rencana Strategis Dinkominfo Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi pedoman strategis pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu tahun 2025 sampai dengan 2029.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dinkominfo Kabupaten Temanggung telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur capaian kinerja.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

| Skala | Kriteria |
|-----------------|---------------|
| 91 % ≤ 100,00 % | Sangat tinggi |
| 76% ≤ 90,00% | Tinggi |
| 66 % ≤ 75,00 % | Sedang |
| 51% ≤ 65,00 % | Rendah |
| ≤ 50,00 % | Sangat rendah |

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

1. Capaian Kinerja Tujuan – Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan strategis Dinkominfo Kabupaten Temanggung berfokus pada percepatan Transformasi Digital yang Terintegrasi, Aman, dan Inklusif. Melalui mandat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Dinkominfo berperan sebagai dinamisor utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan pelayanan publik yang responsif.

Sebagai pengampu utama transformasi digital di daerah, Dinkominfo Kabupaten Temanggung menetapkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai indikator tujuan organisasi yang paling krusial. Indikator ini bukan sekadar angka penilaian, melainkan cerminan keberhasilan Dinkominfo dalam mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam seluruh lini tata kelola pemerintahan.

Indeks SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian terhadap implementasi SPBE dilakukan dengan menggunakan pendekatan tingkat kematangan (*maturity level*). Metode ini tidak hanya mengukur ketersediaan teknologi, tetapi juga menilai sejauh mana proses digitalisasi telah terinternalisasi, terukur, dan berkelanjutan dalam budaya kerja organisasi. Berdasarkan peraturan yang berlaku, evaluasi komprehensif ini

dilakukan dengan membedah 4 (empat) domain penilaian utama yang saling berinteraksi sebagai berikut:

- 1) Domain Kebijakan Internal SPBE; Domain ini merupakan fondasi legalitas dan arah strategis organisasi. Penilaian difokuskan pada ketersediaan regulasi lokal (seperti Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tata kelola, peta rencana, dan pedoman teknis SPBE.
- 2) Domain Tata Kelola SPBE; Fokus pada domain ini adalah struktur organisasi dan mekanisme koordinasi dalam penyelenggaraan SPBE. Evaluasi mencakup peran Tim Koordinasi SPBE, keberadaan arsitektur SPBE, serta bagaimana instansi mengelola infrastruktur dan aplikasi secara terpadu.
- 3) Domain Manajemen SPBE; Domain ini menilai efektivitas instansi dalam mengelola berbagai aspek pendukung operasional digital. Hal ini meliputi Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, hingga Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 4) Domain Layanan SPBE; Sebagai muara dari seluruh sistem, domain ini mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna, baik Layanan Administrasi Pemerintahan (internal) maupun Layanan Publik (eksternal).

Tingkat kematangan penyelenggaraan SPBE diukur melalui capaian nilai indeks tertentu. Berdasarkan standar penilaian yang berlaku, hasil evaluasi tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa predikat sebagaimana rincian pada tabel di bawah ini

Tabel 3.2
Predikat Indeks SPBE

| No | Nilai Indeks | Predikat |
|----|--------------|-------------|
| 1 | 4,2 – 5,0 | Memuaskan |
| 2 | 3,5 – < 4,2 | Sangat baik |
| 3 | 2,6 – < 3,5 | Baik |
| 4 | 1,8 – < 2,6 | Cukup |
| 5 | < 1,8 | Kurang |

Tabel 3.3 menyajikan data capaian tujuan Dinkominfo tahun 2025 yang berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi. Pengukuran keberhasilan ini menggunakan parameter Indeks SPBE.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tujuan Dinkominfo Tahun 2025

| TUJUAN : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Berbasis Teknologi Informasi | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------------------------------|------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| No | Indikator tujuan | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) | Tahun 2025 | | | Renstra 2025-2029 | | |
| | | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target Th 2029 | Realisasi Th 2025 | Capaian Kinerja s/d 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5* 100 | 8 | 9 | 10=9/8* 100 |
| 1 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Nilai | 100% | 3,70 | 3,80 | 100% | 3,90 | 3,80 | 97,44% |
| Capaian Kinerja Tujuan | | | 100% | | | 100% | | | 97,44% |

Tabel diatas menggambarkan efektivitas pencapaian tujuan strategis Dinkominfo dalam upaya "*Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Berbasis Teknologi Informasi*" melalui parameter utama Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

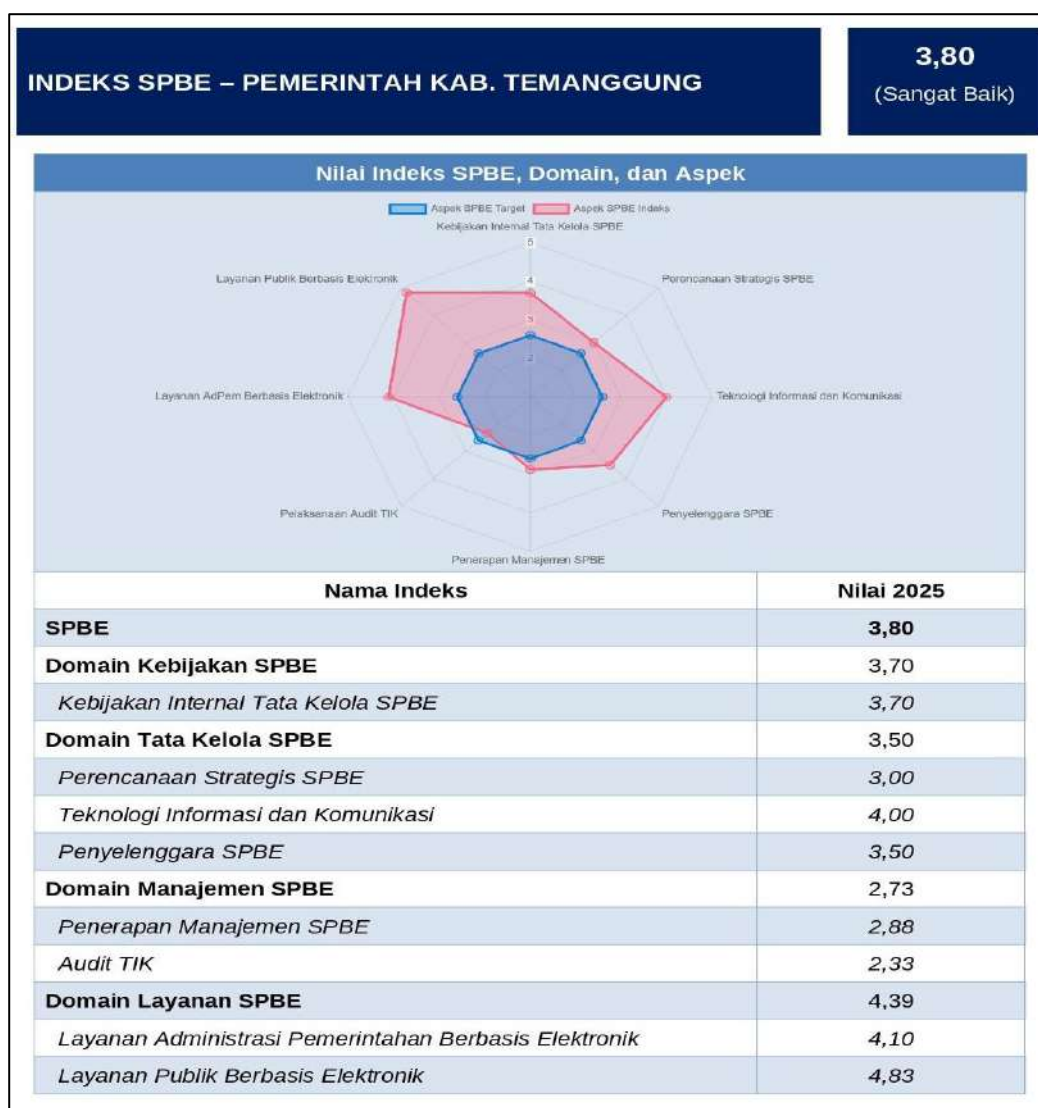
Pada tahun anggaran 2025, Dinkominfo menetapkan target nilai Indeks SPBE sebesar 3,70. Target ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh elemen tata kelola digital, mulai dari kebijakan internal, tata kelola infrastruktur, hingga layanan publik berbasis elektronik, berjalan sesuai standar nasional. Data menunjukkan realisasi yang berhasil diraih adalah 3,80. Dengan realisasi yang melebihi angka target dasar, tingkat capaian kinerja tahunan tercatat sempurna sebesar 100%. Hal ini merefleksikan keberhasilan instansi dalam mengintegrasikan berbagai platform layanan digital dan memperkuat koordinasi antar-unit kerja dalam ekosistem pemerintahan elektronik.

Visi jangka panjang yang tertuang dalam Renstra 2025-2029 memproyeksikan target akhir Indeks SPBE pada angka 3,90 di tahun 2029, dengan realisasi skor sebesar 3,80, progres kumulatif terhadap target akhir

lima tahunan telah menyentuh angka 97,44%. Angka 97,44% ini menunjukkan posisi yang sangat optimis. Dinkominfo hanya menyisakan selisih sebesar 0,10 poin untuk mencapai target puncak di tahun 2029. Dengan sisa waktu empat tahun dalam periode Renstra, instansi memiliki ruang gerak yang sangat luas untuk melakukan penyempurnaan pada aspek-aspek minor (seperti audit teknologi informasi dan inovasi layanan cerdas) guna mengunci keberhasilan target akhir lebih cepat dari jadwal yang ditentukan.

Tabel berikut ditampilkan hasil evaluasi nilai kematangan penyelenggaraan SPBE yang diperoleh Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Tabel 3.4
Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2025



Dari hasil penilaian diatas dapat di jelaskan bahwa pada tahun 2025 Dinkominfo telah mencapai tingkat kematangan SPBE dengan predikat “Sangat Baik” dengan indeks 3,80, yang menunjukkan bahwa sebagian besar layanan dan tata kelola digital telah terintegrasi. Namun hasil evaluasi menunjukkan adanya ketimpangan performa, di mana Domain Manajemen menjadi titik terlemah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun infrastruktur dan aplikasi sudah tersedia, aspek keberlanjutan, keamanan, dan standarisasi operasional belum berjalan seoptimal aspek lainnya.

Domain Manajemen masih menjadi area yang memerlukan akselerasi peningkatan dibandingkan tiga domain lainnya. Terdapat beberapa faktor krusial yang menyebabkan nilai pada domain ini belum optimal:

1) Belum Terlembaganya Audit TIK secara Periodik

Faktor utama rendahnya nilai pada aspek ini adalah belum terlaksananya audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara menyeluruh, yang mencakup audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan. Saat ini, pengawasan sistem masih bersifat insidental dan belum menjadi agenda rutin tahunan yang terstandarisasi sesuai dengan Standar Audit TIK Nasional.

2) Optimalisasi Manajemen Keamanan Informasi dan Data

Meskipun infrastruktur keamanan telah tersedia, pemenuhan standar manajemen keamanan informasi (seperti Penerapan ISO 27001) belum mencakup seluruh layanan strategis. Selain itu, manajemen data belum sepenuhnya selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia, di mana ketersediaan kamus data dan metadata sektoral masih dalam tahap pengembangan, sehingga menghambat proses pertukaran data yang bersifat *seamless*.

3) Kelemahan dalam Pemantauan dan Evaluasi (Monev) Internal

Penyelenggaraan manajemen SPBE belum didukung oleh siklus *Plan-Do-Check-Action* (PDCA) yang kuat. Kurangnya bukti dukung (*eviden*) berupa laporan hasil evaluasi rutin atas manajemen aset, manajemen SDM, dan manajemen layanan menjadi kendala utama dalam meraih skor maksimal pada tingkat kematangan 4 atau 5.

Dengan indeks 3.80 (predikat sangat baik) secara umum dapat digambarkan bahwa infrastruktur SPBE, layanan publik secara elektronik, keamanan data dan informasi di Kabupaten Temanggung dinilai baik. Dampak manfaatnya adalah masyarakat bisa menikmati dan memanfaatkan layanan-layanan publik yang disediakan oleh Pemkab. Temanggung dengan mudah, seperti *free wifi* di area publik, pelayanan publik berbasis elektronik yang efektif dan efisien, keamanan dan kenyamanan pengelolaan data pemerintah, serta jaminan tindak lanjut atas aduan dan keluhan masyarakat.

Pada Tabel berikut disajikan perbandingan capaian kinerja SPBE Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja SPBE Tahun 2025
Terhadap Tahun Sebelumnya

| No | Indikator | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
|-----------------|--|--------------------|-----------|---------|--------------------|-----------|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3,20 | 3,64 | 100 | 3,70 | 3,80 | 100 |
| Predikat | | Sangat Baik | | | Sangat Baik | | |

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Temanggung menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan positif dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data kinerja, terdapat lompatan kualitas yang signifikan baik dari sisi target maupun realisasi nilai indeks di lapangan.

Pada tahun 2024, target indeks SPBE ditetapkan sebesar 3,20 dengan realisasi melampaui target di angka 3,64. Keberhasilan ini memberikan fondasi kuat bagi Dinkominfo untuk menetapkan target yang lebih tinggi pada tahun berikutnya. Memasuki tahun 2025, target ditingkatkan secara signifikan menjadi 3,70. Meskipun target dinaikkan, realisasi indeks kembali melampaui target dengan raih nilai 3,80. Secara kualitatif, Kabupaten Temanggung berhasil mempertahankan predikat "Sangat Baik" selama dua tahun berturut-turut.

Peningkatan nilai sebesar 0,16 poin dari tahun 2024 ke 2025 membuktikan bahwa upaya penguatan tata kelola pemerintahan berbasis

teknologi informasi di Kabupaten Temanggung tidak hanya bersifat administratif, tetapi terus mengalami perbaikan berkelanjutan. Dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan di tiap tahunnya, posisi Kabupaten Temanggung semakin solid dalam mewujudkan pemerintahan digital yang akuntabel.

Berikut ini juga disajikan perbandingan capaian kinerja SPBE Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2025.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja SPBE
Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah dan Kementerian Kominfo

| No | Indikator | Satuan | Realisasi Tahun 2025 | | |
|-----------------|--|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Kabupaten Temanggung | Provinsi Jawa Tengah | Kementerian Kominfo |
| 1 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Nilai | 3,80 | 4,42 | 4,75 |
| Predikat | | | Sangat Baik | Memuaskan | Memuaskan |

Tabel 3.6 diatas menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Temanggung dalam Peta SPBE Nasional berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2025, menunjukkan performa yang kompetitif. Meskipun menyandang predikat "Sangat Baik", jika disandingkan dengan institusi di tingkat yang lebih tinggi, terdapat beberapa poin perbandingan yang strategis:

- 1) Terhadap Provinsi Jawa Tengah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah unggul dengan nilai 4,42 predikat "Memuaskan". Selisih sebesar 0,62 poin ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan digital di level provinsi selangkah lebih maju.
- 2) Terhadap Kementerian Kominfo
Sebagai instansi pembina teknologi informasi nasional, Kementerian Kominfo mencatatkan nilai tertinggi sebesar 4,75 (Predikat Memuaskan). Perbandingan ini menempatkan Kabupaten Temanggung pada posisi yang

sedang berupaya mengejar standar nasional dalam transformasi digital pemerintahan.

Meskipun secara nilai nominal Kabupaten Temanggung berada di bawah Provinsi dan Kementerian, predikat yang diraih merupakan bukti nyata bahwa Temanggung berhasil melampaui standar minimum pelayanan digital bagi masyarakat. Selisih angka yang ada menjadi ruang akselerasi bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk terus memperkuat infrastruktur dan inovasi layanan agar mampu mencapai predikat "Memuaskan" seperti yang diraih oleh tingkat provinsi maupun kementerian.

Keberhasilan Kabupaten Temanggung dalam meraih indeks 3,80 dan melampaui target tahun 2025 didorong oleh beberapa faktor strategis yang saling berintegrasi. Keberhasilan ini bukan sekadar hasil teknis, melainkan buah dari sinergi kebijakan dan operasional, antara lain:

1) Komitmen Pimpinan dan Regulasi yang Kuat

Dukungan penuh dari pimpinan daerah menjadi motor utama dalam menggerakkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengadopsi sistem digital. Adanya kebijakan lokal yang jelas mengenai standarisasi tata kelola data dan integrasi sistem memastikan bahwa setiap inovasi teknologi selaras dengan sasaran strategis daerah.

2) Akselerasi Integrasi Layanan (*Interoperabilitas*)

Tahun 2025 menjadi titik balik dalam pengurangan aplikasi yang bersifat sektoral atau terpisah-pisah. Dinkominfo Kabupaten Temanggung berhasil mendorong interkoneksi antar layanan publik, sehingga data dapat mengalir secara otomatis antar instansi. Hal ini meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat dalam satu pintu.

3) Penguatan Infrastruktur dan Keamanan Informasi

Peningkatan infrastruktur jaringan serta pemanfaatan pusat data yang lebih stabil menjadi fondasi bagi nilai SPBE yang tinggi. Selain itu, penerapan standar keamanan siber dan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang semakin luas di lingkungan pemerintah kabupaten meningkatkan aspek kepercayaan dan validitas dokumen digital.

4) Peningkatan Literasi Digital ASN

Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap OPD membuahkan hasil. ASN di Kabupaten Temanggung kini lebih adaptif dalam mengoperasikan sistem informasi pemerintahan, yang secara langsung berdampak pada kualitas input data dan akuntabilitas pelaporan mandiri SPBE.

5) Inovasi Layanan Publik Berbasis Masyarakat

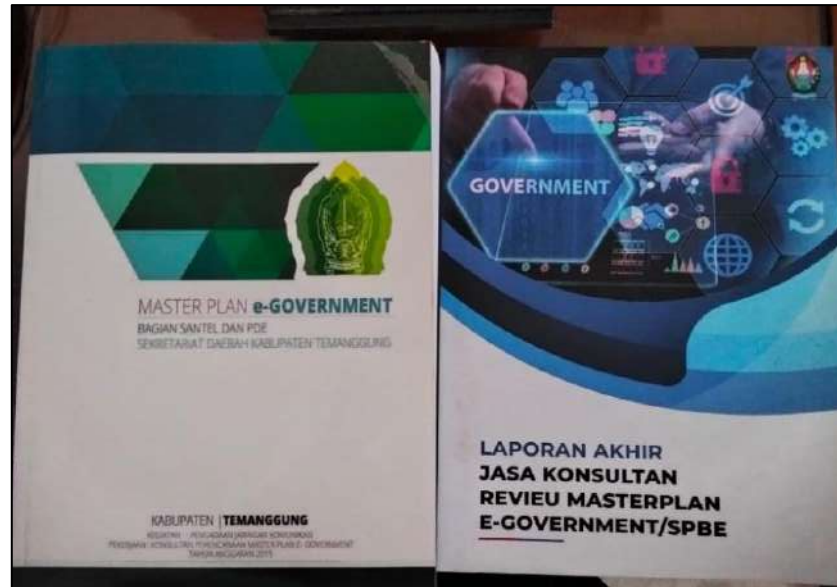
Pengembangan aplikasi layanan publik yang mengutamakan pengalaman pengguna (*user experience*) membuat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital meningkat. Respons positif dari pengguna ini menjadi poin tambah dalam penilaian kematangan layanan pada evaluasi SPBE.

Selain itu capaian kinerja SPBE Kabupaten Temanggung yang diraih pada tahun 2025 ini juga diperkuat oleh inovasi unggulan, yaitu Pembangunan dan Implementasi *Smart Village* di seluruh desa se-Kabupaten Temanggung. Inovasi ini bukan sekadar penyediaan perangkat TIK, melainkan perwujudan kedaulatan digital hingga ke level pemerintahan terkecil. Melalui program ini, seluruh desa kini telah terintegrasi dengan sistem informasi kabupaten, memungkinkan masyarakat desa mengakses layanan administratif secara mandiri dan cepat. Inovasi ini secara nyata memangkas birokrasi dan waktu tunggu, sejalan dengan semangat Pemerintah Digital Nasional.

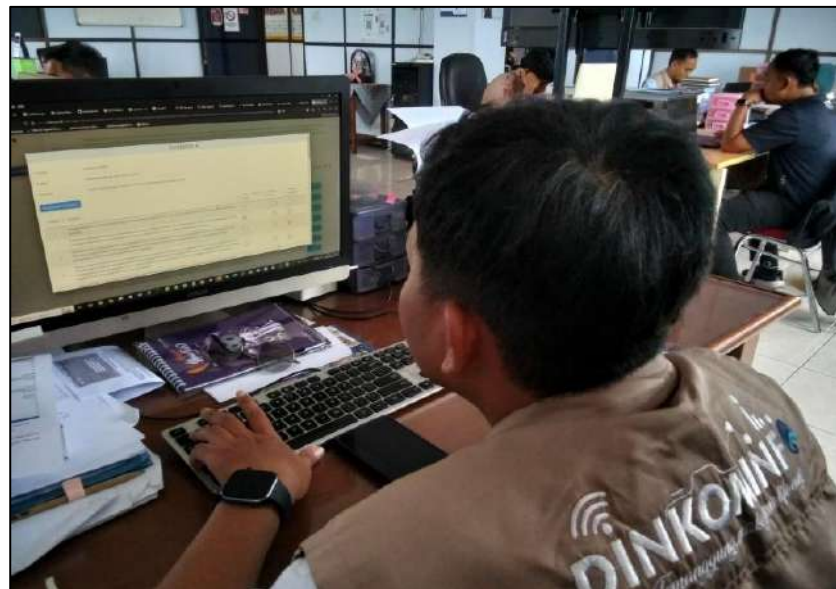
Implementasi *Smart Village* telah menjadi mesin penggerak dalam penguatan data sektoral. Seluruh desa kini berperan aktif dalam pemutakhiran data secara *real-time*. Hal ini memastikan kebijakan pembangunan di Kabupaten Temanggung didasarkan pada data yang akurat dan aktual dari lapangan. Selain aspek pemerintahan, inovasi ini juga mencakup penyediaan infrastruktur internet publik dan platform digital untuk promosi potensi unggulan desa. Langkah ini merupakan bentuk konkret dukungan terhadap Program Desa Digital guna mendorong ekonomi kreatif dan memperluas pasar produk lokal.

Dinkominfo tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga berupaya menjamin aspek keamanan siber di tingkat desa melalui sosialisasi dan pendampingan teknis secara berkala. Fokus pada tahun berikutnya adalah

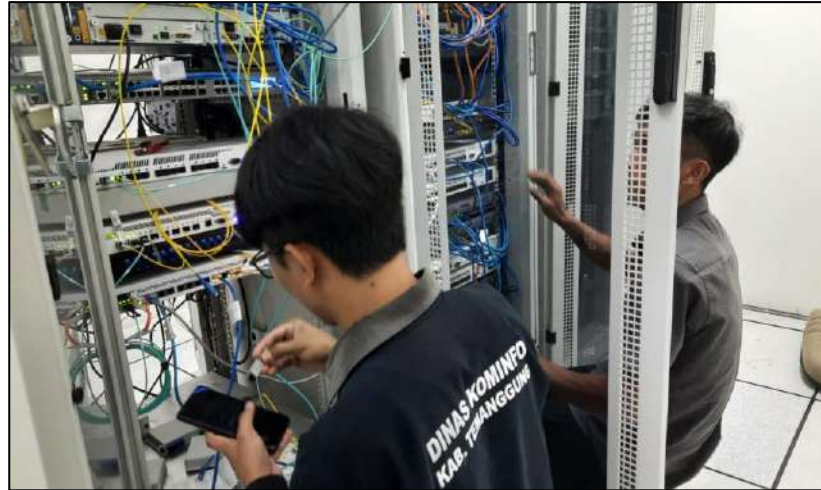
penguatan kualitas layanan publik digital dan integrasi sistem informasi yang lebih inklusif, sehingga mampu melampaui standar minimal yang ditetapkan dalam rencana strategis.



Gb 3.1
Master Plan e-Government Kabupaten Temanggung



Gb 3.2
Pengolahan Data Tim SPBE



Gb 3.3
Pemeliharaan Data Center



Gb 3.4
Pemasangan Jaringan Fiber Optic (FO)

2. Capaian Kinerja Sasaran – Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pencapaian Tujuan Dinkominfo Kabupaten Temanggung didukung oleh serangkaian capaian kinerja sasaran yang merepresentasikan kualitas transformasi digital daerah. Indikator kinerja ini dirancang untuk memotret sejauh mana teknologi informasi mampu meningkatkan efisiensi internal pemerintah sekaligus kualitas layanan bagi masyarakat. Berdasarkan Renstra Dinkominfo Tahun 2025-2029 dan sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2025 terdapat 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator sebagaimana uraian berikut.

1) Sasaran Strategis 1; Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran 1

| Sasaran 1: Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------------------------------|------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| No | Indikator Sasaran | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) | Tahun 2025 | | | Renstra 2025-2029 | | |
| | | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target Th 2029 | Realisasi Th 2025 | Capaian Kinerja s/d 2025 (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $7=6/5*100$ | 8 | 9 | $10=9/8*100$ |
| 1 | Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Nilai | 0 | 4,50 | 4,39 | 97,56% | 4,80 | 4,39 | 91,45% |
| Capaian Kinerja Sasaran 1 | | | 0 | | | 97,56% | | | 91,45% |

Pada tahun anggaran 2025, Sasaran 1 yang berfokus pada penguatan Layanan SPBE menunjukkan performa yang sangat positif. Melalui indikator Indeks Layanan SPBE, instansi menetapkan target sebesar 4,50. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi yang berhasil diraih adalah 4,39 atau setara dengan 97,56%. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa sebagian besar rencana aksi transformasi digital, mulai dari integrasi aplikasi hingga penguatan infrastruktur pusat data, telah berjalan sesuai koridor.

Salah satu poin paling krusial dalam tabel ini adalah perbandingan antara realisasi saat ini dengan target akhir masa jabatan (Renstra 2025-2029). Dengan target akhir tahun 2029 sebesar 4,80, raihan angka 4,39 pada tahun pertama berarti instansi telah memenuhi 91,45% dari total target lima tahunan. Terdapat selisih sebesar 0,41 poin untuk mencapai kesempurnaan di tahun 2029. Posisi yang sudah mencapai 91,45% di awal periode ini memberikan keuntungan strategis.

Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2025 terhadap capaian kinerja 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Indeks Layanan SPBE Tahun 2025
Terhadap Tahun 2024

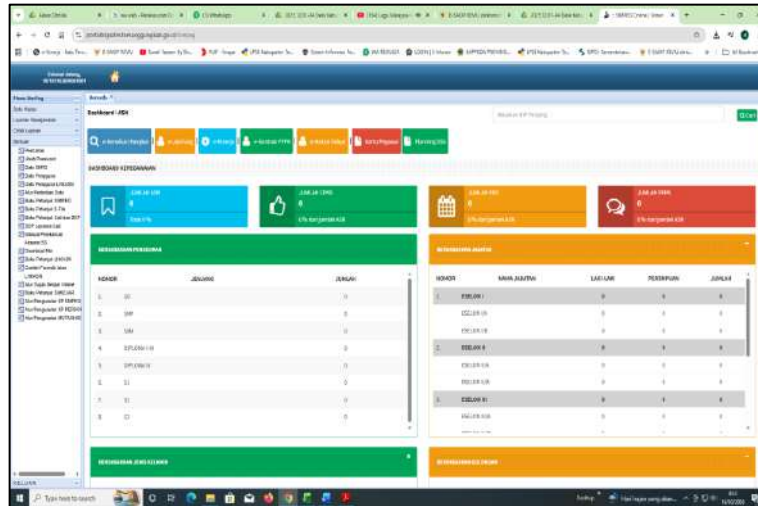
| Indikator | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
|--|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|
| | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 0 | 4,46 | 0 | 4,50 | 4,39 | 97,56% |

Tabel diatas menyajikan perbandingan kinerja SPBE selama dua tahun anggaran. Poin penting yang perlu diperhatikan adalah pada tahun 2024, Indeks Layanan SPBE belum ditetapkan sebagai indikator sasaran, sehingga kolom target dan capaian tercatat bernilai 0. Meski demikian, realisasi pada tahun tersebut telah terpantau sebesar 4,46.

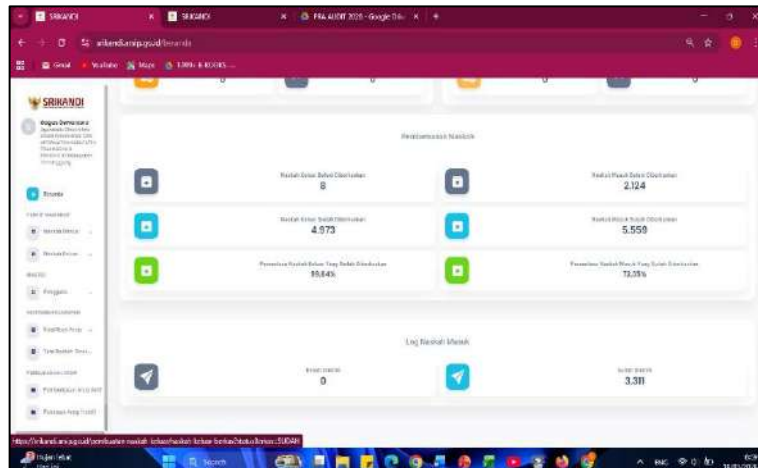
Pada tahun 2025, seiring dengan penguatan transformasi digital, indikator ini ditetapkan sebagai sasaran strategis dengan target yang cukup tinggi sebesar 4,50. Realisasi yang dicapai Adalah 4,39 dengan persentase capaian 97,56%. Meskipun menunjukkan kinerja yang sangat baik, terdapat selisih tipis sebesar 0,11 yang disebabkan oleh beberapa faktor spesifik:

- a) Validasi Dokumen Pendukung: Adanya ketidaksesuaian antara data dukung yang diunggah dengan parameter penilaian terbaru dalam instrumen evaluasi mandiri, sehingga beberapa poin pada aspek Layanan Publik Elektronik tidak terverifikasi maksimal.
- b) Kematangan Interoperabilitas: Masih terdapat kendala teknis dalam integrasi basis data antar aplikasi layanan yang menyebabkan penilaian pada indikator bagi pakai data belum mencapai level kematangan tertinggi.
- c) Keamanan Informasi: Pengetatan standar keamanan pada platform layanan yang memerlukan waktu penyesuaian infrastruktur, sehingga fitur-fitur baru tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya sebelum masa penilaian berakhir.

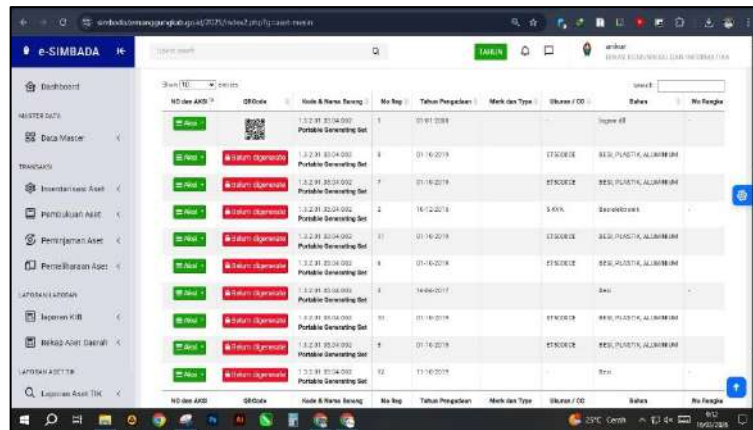
Secara keseluruhan, penurunan nilai dari 4,46 ke 4,39 bersifat penyesuaian terhadap standar evaluasi yang semakin tinggi, bukan penurunan kualitas layanan secara substantif. Hasil ini menjadi dasar penting untuk melakukan penguatan integrasi, peningkatan kualitas pengalaman pengguna, dan pengelolaan layanan elektronik yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Temanggung.



Gb 3.5
Tangkapan Layar Sistem Informasi Kepegawaian



Gb 3.6
Tangkapan Layar Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (srikandi)



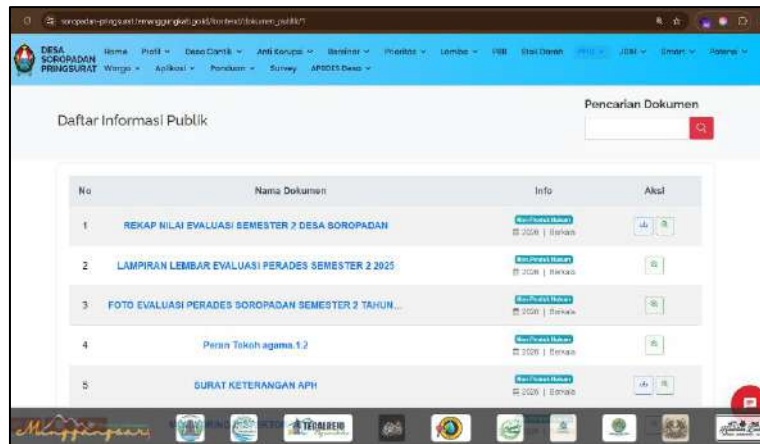
Gb 3.7
Tangkapan Layar Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA)



Gb 3.8
Tangkapan Layar Aplikasi Layanan Digital Smart Village Kab. Temanggung



Gb 3.9
Tangkapan Layar Aplikasi Layanan Sistem Informasi Desa Digital (SIDEDI)



Gb 3.10
Tangkapan Layar Layanan Data PPID Pemerintah Desa



Gb 3.11
Menu List menuju beberapa aplikasi yang digunakan oleh desa/kelurahan



Gb 3.12
Tampilan Informasi Rekap APBDES tiap desa bisa difilter sesuai tahun, kode posting, kecamatan dan desa

2) Sasaran Strategis 2; Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran 2

| Sasaran 2: Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------------------------------|------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| No | Indikator Sasaran | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) | Tahun 2025 | | | Renstra 2025-2029 | | |
| | | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target Th 2029 | Realisasi Th 2025 | Capaian Kinerja s/d 2025 (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $7=6/5*100$ | 8 | 9 | $10=9/8*100$ |
| 1 | Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Nilai | 0 | 3,20 | 3,50 | 100% | 3,60 | 3,50 | 97,22% |
| Capaian Kinerja Sasaran 2 | | | 0 | | | 100% | | | 97,22% |

Berdasarkan tabel diatas menampilkan bahwa terdapat transisi kebijakan yang krusial pada tahun 2024, di mana Indeks Tata Kelola SPBE belum ditetapkan sebagai indikator sasaran resmi seperti halnya Indeks Layanan SPBE, sehingga tidak memiliki bobot target kualitatif (0%). Namun memasuki tahun anggaran 2025, indikator ini diintegrasikan menjadi tolok ukur utama keberhasilan organisasi. Dengan target sebesar 3,20, organisasi berhasil melampaui ekspektasi dengan mencapai nilai realisasi 3,50. Keberhasilan ini menghasilkan Capaian Kinerja Tahunan sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa fondasi Tata Kelola seperti kebijakan internal, peta rencana SPBE, dan koordinasi tim telah terbentuk dengan solid.

Jika ditinjau dari perspektif rencana strategis lima tahunan, performa saat ini menunjukkan tren yang sangat progresif. Dengan target akhir tahun 2029 yang ditetapkan pada nilai 3,60, realisasi tahun 2025 yang sudah menyentuh angka 3,50 berarti Dinkominfo telah mengamankan 97,22% dari target jangka panjang dalam waktu yang lebih singkat dari yang direncanakan.

Jika dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2025 terhadap capaian kinerja 2024 maka terdapat informasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Indeks Tata Kelola SPBE Tahun 2025
Terhadap Tahun 2024

| Indikator | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
|--|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|
| | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 0 | 3,10 | 0 | 3,20 | 3,50 | 100% |

Berdasarkan data pada Tabel 3.8, progres pemenuhan indikator Indeks Tata Kelola SPBE menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada tahun 2024, Indeks Tata Kelola SPBE belum ditetapkan sebagai indikator sasaran resmi, sehingga kolom target dan persentase capaian tercatat nol (0). Meskipun demikian, secara faktual instansi telah mencapai nilai realisasi sebesar 3,10.

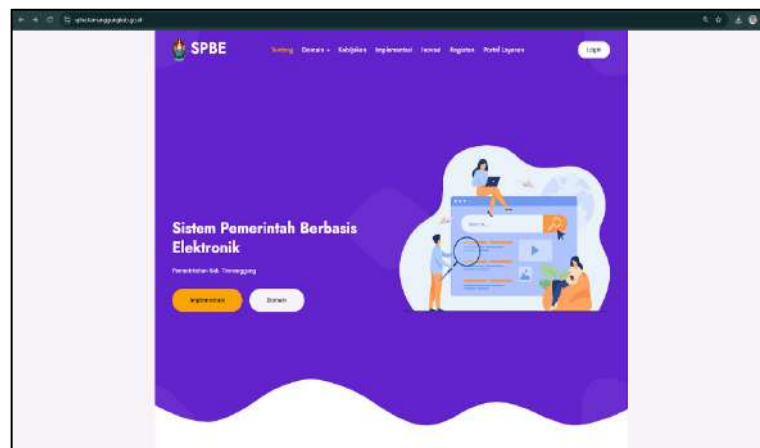
Setelah ditetapkan sebagai indikator sasaran pada tahun 2025, target yang dipatok adalah sebesar 3,20. Dinkominfo berhasil melampaui target tersebut dengan nilai realisasi sebesar 3,50, yang menghasilkan tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%. Terjadi peningkatan nilai absolut realisasi sebesar 0,40 poin (dari 3,10 menjadi 3,50) dalam satu tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan adanya penguatan yang signifikan dalam beberapa aspek yang menunjukkan efektivitas komitmen instansi dalam memantapkan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik sejak indikator ini diresmikan.

Peningkatan signifikan ini dipengaruhi oleh penguatan pada tiga domain utama tata kelola yaitu:

- a) Kebijakan Internal SPBE: Adanya standarisasi prosedur operasional (SOP) yang lebih komprehensif, mencakup aspek manajemen data, keamanan informasi, dan audit teknologi informasi.

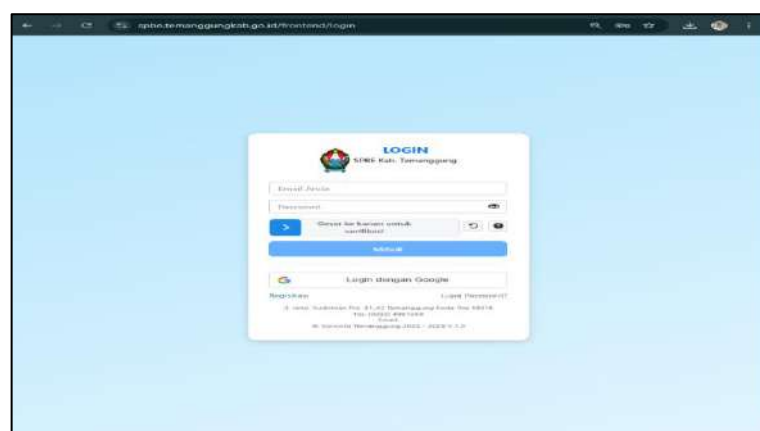
- b) Kelembagaan: Penguatan peran Tim Koordinasi SPBE dalam menyelaraskan proses bisnis antar unit kerja.
- c) Pemanfaatan Teknologi: Keberhasilan integrasi aplikasi berbagi pakai yang mengurangi fragmentasi data, mempermudah akses layanan, dan menurunkan biaya operasional sistem.

Realisasi angka 3,50 ini berdampak langsung pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Tata kelola yang lebih terstruktur memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data menjadi lebih cepat dan akurat. Namun, untuk mempertahankan predikat ini organisasi harus terus melakukan pembaruan pada aspek keamanan siber sesuai standar BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) guna memitigasi risiko integritas data di masa depan.



Gb 3.13

Tampilan halaman depan website Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten

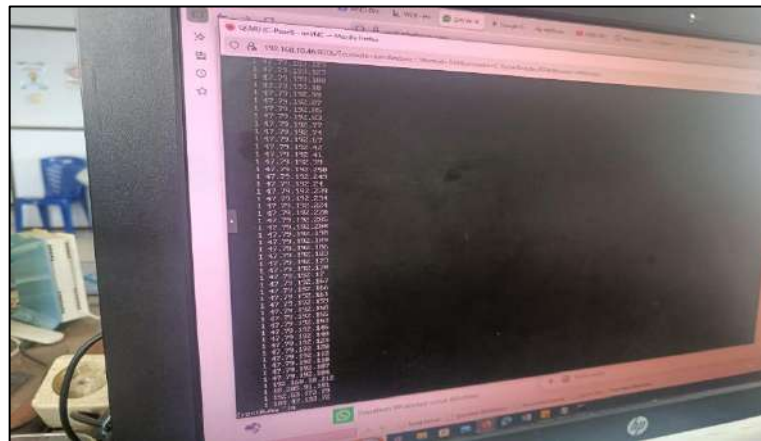


Gb 3.14

Halaman login Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)



Gb 3.15
Penanganan insiden siber di ruang kontrol



Gb 3.16
Analisis ip address pada serangan siber yang masuk



Gb 3.17
Pengecekan konektivitas jaringan internet



Gb 3.18

Migrasi dan instalasi server pencadangan (backup) di Data Center



Gb 3.19

Penggantian Access point untuk wifi publik di area Plaza Temanggung



Gb 3.20

Pemasangan Access point untuk wifi publik di area Taman Pengayoman



Gb 3.21
Forum "Satu Data" Untuk Pemeriksaan Kualitas Data



Gb 3.22
Audit TIK (Infrastruktur & Aplikasi)



Gb 3.23
Kegiatan Bimtek Aplikasi si Dedi untuk Desa penerima pikir tahun 2025

3) Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran 3

| Sasaran 3: Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------|--------------------------------|------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| No | Indikator Sasaran | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) | Tahun 2025 | | | Renstra 2025-2029 | | |
| | | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target Th 2029 | Realisasi Th 2025 | Capaian Kinerja s/d 2025 (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $7=6/5*100$ | 8 | 9 | $10=9/8*100$ |
| 1 | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | Nilai | 100 | 96,00 | 91,34 | 95,15% | 98,00 | 91,34 | 93,20% |
| Capaian Kinerja Sasaran 3 | | | 100 | | | 95,15% | | | 93,20% |

Pada tahun 2024 Dinkominfo mencatatkan kinerja maksimal dengan capaian kinerja 100%. Memasuki tahun 2025 standar target ditingkatkan menjadi 96,00 sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas layanan informasi. Berdasarkan hasil evaluasi KIP Provinsi Jawa Tengah, diperoleh nilai realisasi sebesar 91,34 atau mencapai 95,15% dari target tahunan. Meskipun terdapat selisih sebesar 4,85%, nilai ini tetap menempatkan Pemerintah Daerah pada kualifikasi yang sangat baik. Selisih tersebut mencerminkan adanya standarisasi penilaian yang semakin ketat dari KIP Provinsi, terutama pada aspek penguatan fungsi PPID dan aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas.

Ditinjau dari perspektif rencana strategis lima tahunan, posisi saat ini menunjukkan tren yang sangat positif. Dengan target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 98,00, realisasi tahun 2025 yang berada di angka 91,34 menunjukkan bahwa Dinkominfo telah mengamankan 93,20% dari target jangka panjang tersebut. Artinya, dalam tahun pertama periode Renstra, Pemerintah Daerah telah mendekati ambang batas target akhir yang direncanakan untuk lima tahun ke depan.

Meskipun secara akumulatif (Renstra) capaian sudah sangat tinggi, hasil evaluasi dari KIP Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 menjadi bahan

refleksi penting. Selisih target tahunan yang tidak mencapai 100% menuntut adanya perbaikan pada beberapa titik kritis, seperti digitalisasi arsip informasi publik dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara lebih berkala. Keberhasilan mempertahankan nilai di atas 90 menunjukkan bahwa sistem keterbukaan informasi telah berjalan secara sistemik.

Adapun Perbandingan capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dengan Tahun 2024

| Indikator | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
|------------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|
| | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| Nilai Keterbukaan Informasi Publik | 90,15 | 95,86 | 100 | 96,00 | 91,34 | 93,20 |

Pada tahun 2024, Nilai Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung mencatatkan performa yang sangat impresif. Dengan target sebesar 90,15, realisasi yang dicapai melampaui ekspektasi hingga menyentuh angka 95,86. Capaian ini menempatkan Temanggung pada standar transparansi yang sangat tinggi di tingkat daerah.

Memasuki tahun 2025, seiring dengan semangat peningkatan kualitas layanan, target ditingkatkan secara signifikan menjadi 96,00. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi yang diraih hanya diangka 91,34. Meskipun angka ini secara nominal mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, capaian kinerja terhadap target tetap berada pada level yang solid yaitu 93,20%.

Penurunan realisasi dari 95,86 ditahun 2024 menjadi 91,34 ditahun 2025 di tengah target yang semakin tinggi yaitu 96,00 terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini mencakup sisi penguatan yang menjaga nilai tetap tinggi (di atas 90), sekaligus tantangan

yang menyebabkan target belum tercapai secara maksimal. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Dinamika Standar Penilaian Komisi Informasi

Salah satu faktor eksternal yang paling dominan adalah adanya pembaruan instrumen penilaian atau kuesioner (SAQ) dari Komisi Informasi. Standar pemenuhan dokumen yang lebih detail dan proses verifikasi yang lebih ketat di tahun 2025 menuntut akurasi data yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

b. Akurasi dan Kecepatan Pembaruan Informasi Berkala

Nilai 91,34 menunjukkan bahwa PPID Kabupaten Temanggung masih sangat konsisten dalam menyediakan informasi. Namun, faktor kecepatan pembaruan (*update*) data pada portal PPID oleh masing-masing OPD (PPID) menjadi kunci. Adanya jeda waktu dalam mengunggah dokumen terbaru dapat mempengaruhi skor maksimal pada aspek informasi berkala.

c. Kualitas Respon terhadap Keberatan Informasi

Faktor lain yang dinilai adalah sejauh mana pemerintah daerah mengelola sengketa atau keberatan informasi. Efektivitas dalam merespons pengaduan dan keberatan informasi publik secara formal dan sesuai prosedur hukum berkontribusi besar dalam menjaga nilai tetap berada di angka 90-an.

d. Konsistensi Koordinasi Antar-OPD

Ketergantungan terhadap suplai data dari OPD lain sangat tinggi. Faktor sinergi antar OPD dalam mengirimkan data publik ke PPID Utama mempengaruhi kelengkapan menu informasi di website resmi. Penurunan nilai seringkali disebabkan oleh beberapa OPD yang terlambat menyerahkan dokumen wajib yang diminta.

Meskipun secara angka terdapat penurunan dibanding tahun 2024, nilai 91,34 masih berada dalam kategori "Informatif" (kategori tertinggi dalam KIP). Faktor pendorong utama yang harus diperkuat untuk tahun depan adalah percepatan digitalisasi dokumen di level OPD agar seluruh data wajib dapat diakses publik secara *real-time* sebelum masa penilaian dimulai.



Gb. 3.24
Penerimaan Penghargaan KIP Award Tahun 2025



Gb. 3.25
Penerimaan Penghargaan Lomba Pertunjukan FK Metra Tahun 2025
Tingkat Provinsi Jawa Tengah



Gb 3.26
Host Podcast “Kepoin Yuk” Interview



Gb 3.27

Tim Produksi Konten Bidang Informasi Komunikasi Publik



Gb 3.28

Tim Media Center Melaksanakan Pengambilan Gambar



Gb 3.29

Program “Lebih Dekat” di Radio eRTe FM



Gb 3.30

Publikasi dan Diseminasi Program Kebijakan Melalui Videotron



Gb 3.31

Publikasi dan Diseminasi Program Kebijakan Melalui Media Luar Ruang Baliho

4) Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Sasaran 4

| Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------------------------------|------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| No | Indikator Sasaran | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) | Tahun 2025 | | | Renstra 2025-2029 | | |
| | | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target Th 2029 | Realisasi Th 2025 | Capaian Kinerja s/d 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $7=6/5*100$ | 8 | 9 | $10=9/8*100$ |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah | Nilai | 0 | 79,90 | 88,59 | 100% | 85,30 | 88,59 | 100% |
| 2 | Nilai AKIP Perangkat Daerah | Nilai | 0 | 74,20 | 74,20 | 100% | 76,00 | 74,20 | 97,63% |
| Capaian Kinerja Sasaran 4 | | | 0 | | | 100 | | | 98,81 |

Secara keseluruhan, Sasaran 4 menunjukkan efektivitas kinerja yang sangat optimal dengan rata-rata Capaian Kinerja Sasaran sebesar 100% pada tahun 2025. Keberhasilan ini didorong oleh dua indikator yaitu:

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Mencatatkan realisasi sebesar 88,59, melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar 79,90.
- Nilai AKIP Perangkat Daerah: Berhasil mencapai realisasi sebesar 74,20, tepat sesuai dengan target tahunan yang dipatok 100%. Ini merefleksikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dalam penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja.

Pada tahun 2024, kedua indikator pada sasaran ini mencatatkan angka 0%. Hal ini disebabkan karena baik Indeks Kepuasan Masyarakat maupun Nilai AKIP Perangkat Daerah tahun 2024 belum ditetapkan sebagai indikator sasaran resmi pada Dinkominfo. Meskipun aktivitas pelayanan dan evaluasi akuntabilitas sudah berjalan, secara administrasi keduanya baru diadopsi dalam kerangka kerja sasaran pada tahun 2025.

Maka perolehan nilai di tahun 2025 inilah yang menjadi *baseline* yang kuat bagi pengukuran kinerja untuk tahun-tahun berikutnya.

Secara akumulatif, potret capaian menuju tahun 2029 mencerminkan keberhasilan fase awal yang kuat, sehingga memperlebar peluang tercapainya target Renstra lebih cepat dari jadwal yang direncanakan.

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Target akhir Renstra 2029 ditetapkan sebesar 85,30. Mengingat realisasi saat ini sudah mencapai 88,59, maka indikator ini telah melampaui target akhir Renstra. Secara kumulatif, capaian s/d 2025 tercatat sebesar 100% terhadap target lima tahunan.
- Nilai AKIP Perangkat Daerah: Target akhir tahun 2029 dipatok sebesar 76,00. Dengan realisasi saat ini sebesar 74,20, Pemerintah Daerah telah mengamankan 97,63% dari target akhir Renstra. Hanya terdapat selisih sebesar 1,80 poin yang perlu ditingkatkan dalam empat tahun ke depan.

Berikut adalah penyajian data perbandingan antara target, realisasi dan capaian masing-masing indikator tahun 2025 terhadap capaian kinerja tahun 2024.

Tabel 3.14
Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

| Indikator | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Target | Realisasi | Capaian % | Target | Realisasi | Capaian % |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah | - | - | - | 79,90 | 88,59 | 100 |

Berdasarkan tabel capaian diatas menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2025, Dinkominfo Kabupaten Temanggung berhasil mencatatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 88,59. Angka ini menunjukkan performa yang sangat progresif karena berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 79,90. Dengan selisih keunggulan sebesar

8,69 poin, Dinkominfo dapat membuktikan bahwa kualitas layanan publik yang diberikan berada pada kategori "Sangat Baik".

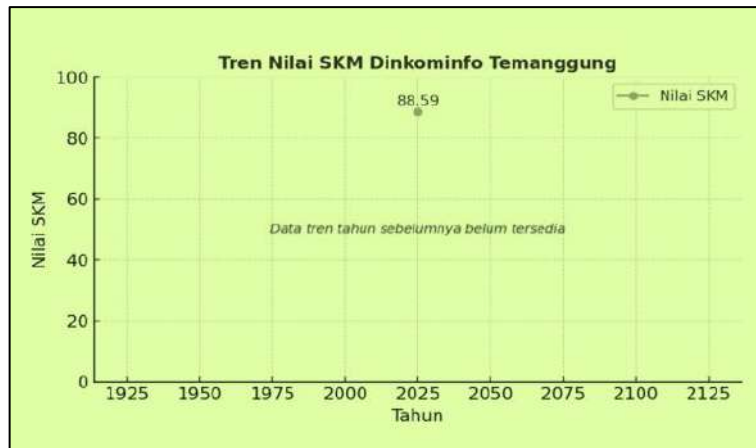
Capaian tahun 2025 ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi mengingat pada tahun 2024, Dinkominfo belum melaksanakan survei IKM secara mandiri. Ketidakhadiran data realisasi di tahun sebelumnya menjadikan hasil tahun 2025 ini sebagai *baseline* atau titik awal baru dalam pengukuran kualitas layanan. Keberhasilan langsung menembus angka 88,59 saat survei kembali digulirkan menunjukkan bahwa meskipun sempat ada kekosongan data evaluasi formal, standar pelayanan di internal Dinkominfo tetap terjaga dan bahkan melampaui ekspektasi.

Tabel 3.15
Nilai AKIP Perangkat Daerah

| Indikator | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
|-----------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Nilai AKIP Perangkat Daerah | 71,50 | 71,50 | 100 | 74,20 | 74,20 | 100 |

Berdasarkan hasil evaluasi formal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung, Dinkominfo berhasil mendapatkan nilai AKIP sebesar 74,20 pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan efektivitas perencanaan yang cukup akurat, di mana realisasi yang dihasilkan 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, performa akuntabilitas Dinkominfo menunjukkan tren peningkatan yang menggembarakan. Terdapat kenaikan sebesar 2,70 poin dari realisasi tahun 2024 yang bernilai 71,50. Kenaikan ini bukan sekadar pertumbuhan angka, melainkan cerminan dari komitmen Dinkominfo dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun lalu, terutama dalam sinkronisasi antara perencanaan strategis dan penggunaan anggaran yang lebih berorientasi hasil.



Gb 3.32
 Nilai SKM Dinkominfo Temanggung



Gb 3.33
 Grafik Nilai SKM Dinkominfo Temanggung Per Unsur

C. HASIL EVALUASI AKIP

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar **74,20** dengan predikat **"BB"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Sangat Baik"**. Rincian hasil evaluasi per komponen yaitu sebagai berikut:

Tabel 8.
Hasil Evaluasi AKIP

| Komponen yang dinilai | Bobot | Nilai | |
|--|------------|--------------|--------------|
| | | 2024 | 2025 |
| a. Perencanaan Kinerja | 30 | 22,80 | 22,80 |
| b. Pengukuran Kinerja | 30 | 20,70 | 21,90 |
| c. Pelaporan Kinerja | 15 | 10,50 | 12,00 |
| d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | 17,50 | 17,50 |
| Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 71,50 | 74,20 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | BB | BB |

Gb 3.34
 Hasil Evaluasi AKIP Dinkominfo Temanggung Tahun 2025

3. Capaian Kinerja Program

Program yang dilaksanakan oleh Dinkominfo pada tahun 2025 sebanyak 5 (lima) program dengan 9 (sembilan) kegiatan. Program yang secara langsung mendukung sasaran strategis tahun 2025 terdapat 4 (empat) program dengan 8 (delapan) indikator kinerja.

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Program 1
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

| Program 1: Sasaran Program 1: Terwujudnya pengelolaan dan layanan informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat dan valid | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------------------------------|------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| No | Indikator Program | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) | Tahun 2025 | | | Renstra 2025-2029 | | |
| | | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target Th 2029 | Realisasi Th 2025 | Capaian Kinerja s/d 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $7=6/5*100$ | 8 | 9 | $10=9/8*100$ |
| 1 | Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif | % | 85,29 | 85,5 | 85,29 | 99,75 | 86,50 | 85,29 | 98,60 |
| 2 | Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo | % | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik | % | NA | 15 | 28,74 | 100 | 25 | 28,74 | 100 |
| Rata-rata Capaian Kinerja Program 1 | | | 95,10 | | | 99,94 | | | 99,65 |

Tabel di atas menyajikan gambaran komprehensif mengenai capaian kinerja Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk mewujudkan ekosistem layanan informasi

publik yang memenuhi kriteria mudah, murah, cepat, tepat, dan valid. Program ini merupakan pilar utama dalam memastikan hak masyarakat atas terpenuhinya informasi secara optimal sekaligus memperkuat transparansi tata kelola pemerintahan.

Sepanjang tahun anggaran 2025, implementasi program ini menunjukkan kinerja yang konsisten. Secara keseluruhan, efektivitas program tercermin dari rata-rata capaian kinerja tahunan yang menyentuh angka 99,94%. Tingginya persentase ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh target output dan outcome yang direncanakan sepanjang tahun berjalan telah terealisasi dengan deviasi yang minimal.

Keberhasilan ini tidak hanya bersifat insidental pada tahun berjalan, namun juga menunjukkan tren positif dalam kerangka perencanaan jangka menengah. Hal ini dibuktikan dengan akumulasi capaian kinerja hingga akhir tahun 2025 yang mencapai 99,65%. Angka akumulatif yang mendekati sempurna tersebut menandakan bahwa program ini berada pada jalur yang tepat dalam memenuhi target-target strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sekaligus mencerminkan komitmen instansi dalam memberikan layanan informasi publik berkualitas tinggi yang berkelanjutan.

Penjelasan secara rinci atas capaian kinerja masing-masing indikator ditahun 2025, perbandingan capaian kinerja terhadap tahun sebelumnya, serta gambaran proyeksi terhadap target akhir Renstra 2029, disajikan pada tabel-tabel dan uraian berikut.

Tabel 3.17

Persentase Lembaga Binaan dan Mitra Diseminasi Informasi Dinkominfo Yang Aktif

| Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) | Tahun 2025 | | | Renstra 2025-2029 | | |
|--|--------|--------------------------------|------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target Th 2029 | Realisasi Th 2025 | Capaian Kinerja s/d 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6=5/4*100$ | 7 | 8 | $9=8/7*100$ |
| Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif | % | 85,29 | 85,5 | 85,29 | 99,75 | 86,50 | 85,29 | 98,60 |

Pada tahun anggaran 2025, indikator Persentase Lembaga Binaan dan Mitra Diseminasi Informasi yang Aktif ditetapkan dengan target sebesar 85,5%. Berdasarkan hasil pelaksanaan program di lapangan, realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 85,29%. Hal ini menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Tahunan 2025 berada pada angka 99,75%, yang masuk dalam kategori sangat tinggi dan mendekati target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 yang juga berada pada angka 85,29%, maka performa kemitraan Dinkominfo pada tahun 2025 menunjukkan kondisi yang stabil. Meskipun tidak terjadi kenaikan persentase secara angka, keberhasilan mempertahankan tingkat keaktifan mitra di tengah dinamika perubahan struktur lembaga lokal menunjukkan konsistensi dalam pembinaan.

Dalam peta jalan jangka menengah (Renstra 2025-2029), target akhir yang ingin dicapai pada tahun 2029 adalah sebesar 86,50%. Dengan realisasi saat ini sebesar 85,29%, maka Capaian Kinerja s/d tahun 2025 terhadap Renstra telah menyentuh angka 98,60%. Data ini mengindikasikan bahwa instansi hampir memenuhi seluruh target jangka panjang dalam waktu yang lebih singkat, menunjukkan efektivitas strategi kemitraan yang telah dijalankan.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi ketercapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

a) Faktor Pendorong

- Intensitas Pendampingan; Program pembinaan rutin terhadap lembaga binaan (seperti Kelompok Informasi Masyarakat/KIM) yang dilakukan secara konsisten oleh Dinkominfo.
- Pemanfaatan Media Digital: Semakin aktifnya mitra dalam menggunakan platform media sosial dan kanal digital untuk mendiseminasikan informasi publik, sehingga aktivitas mereka lebih terukur.
- Dukungan Jejaring: Hubungan kolaboratif yang kuat antara pemerintah dengan komunitas lokal sebagai agen penyebar informasi.

b) Faktor Penghambat

- Kapasitas SDM Mitra: Masih adanya fluktuasi keaktifan pengurus pada lembaga binaan tertentu akibat pergantian personel atau keterbatasan kompetensi digital.
- Keterbatasan Sarana: Belum meratanya sarana pendukung diseminasi pada beberapa titik wilayah binaan yang jauh dari pusat kota.

c) Upaya yang Dilakukan:

- Bimbingan Teknis Berkelanjutan: Pelatihan literasi digital dan manajemen konten secara periodik bagi pengurus lembaga binaan.
- Pemberian Stimulus Motivasi: Memberikan apresiasi atau penghargaan kepada mitra yang paling aktif.
- Digitalisasi Monitoring: Mengembangkan sistem pelaporan aktivitas mitra secara daring (online) untuk memudahkan pemantauan keaktifan secara *real-time*.

Dinkominfo terus melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada lembaga binaan serta mitra diseminasi informasi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelola informasi, baik dari sisi pemahaman materi, teknik penyampaian informasi, maupun pemanfaatan media komunikasi. Selain itu, penguatan koordinasi dan monitoring berkala juga dilakukan guna memastikan lembaga binaan tetap aktif serta mampu berperan optimal dalam mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat.

Tabel 3.18
Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik

| Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) | Tahun 2025 | | | Renstra 2025-2029 | | |
|--|--------|--------------------------------|------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target Th 2029 | Realisasi Th 2025 | Capaian Kinerja s/d 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6=5/4*100$ | 7 | 8 | $9=8/7*100$ |
| Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Pada tahun anggaran 2025 Dinkominfo menetapkan target sebesar 100% untuk terselenggaranya diseminasi informasi melalui seluruh kanal media, baik elektronik (media sosial, website, radio, TV) maupun non-elektronik (baliho, leaflet, tatap muka). Berdasarkan data realisasi, program ini berhasil terlaksana sepenuhnya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan efektivitas distribusi informasi publik yang menjangkau seluruh lini media tanpa adanya hambatan operasional yang berarti.

Capaian pada tahun 2025 menunjukkan konsistensi performa yang sangat stabil dibandingkan dengan tahun 2024 yang juga berada pada angka 100%. Keberhasilan mempertahankan angka maksimal selama dua tahun berturut-turut mengindikasikan bahwa sistem manajemen konten dan jadwal publikasi informasi di Dinkominfo telah berjalan secara sistematis dan terstruktur dengan sangat baik.

Dalam perspektif jangka menengah, target akhir Renstra tahun 2029 ditetapkan sebesar 100%. Dengan realisasi tahun 2025 yang sudah menyentuh angka 100%, maka capaian kinerja s/d tahun 2025 terhadap Renstra telah mencapai 100%. Artinya, instansi telah berhasil memenuhi standar maksimal layanan diseminasi informasi lebih awal dari periode akhir perencanaan, sehingga fokus pada sisa tahun Renstra adalah menjaga kualitas (konten) daripada sekadar kuantitas (kanal).

Faktor-faktor yang memengaruhi ketercapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

a) Faktor Pendorong

- Multikanal yang terintegrasi; Yaitu pemanfaatan *Omnichannel* yang menghubungkan konten media sosial (Instagram, Facebook, YouTube) dengan media luar ruang (videotron dan baliho) secara simultan, sehingga penyebaran informasi menjadi masif.
- Tim kreatif yang solid: Adanya tim produksi konten yang mampu mengemas informasi kebijakan pemerintah menjadi narasi yang mudah dipahami masyarakat di berbagai platform.
- Kemitraan strategis: Hubungan baik dengan media massa lokal dan nasional yang memperluas jangkauan diseminasi melampaui kanal mandiri pemerintah.

b) Faktor Penghambat

- Perubahan algoritma media sosial: Dinamika algoritma platform digital yang sering berubah terkadang menurunkan tingkat keterjangkauan (*reach*) organik jika tidak diimbangi dengan strategi konten yang adaptif.
- Kerusakan teknis infrastruktur: Adanya kendala teknis pada beberapa perangkat non-elektronik luar ruang (seperti videotron yang memerlukan perbaikan berkala) akibat faktor cuaca atau usia teknis perangkat.
- Saturasi informasi: Tingginya volume informasi di masyarakat membuat konten pemerintah harus bersaing ketat dengan informasi lain (hoaks atau hiburan), sehingga risiko pesan tidak tersampaikan secara utuh tetap ada.

c) Upaya yang dilakukan

- Modernisasi kanal digital: Mengalokasikan anggaran pemeliharaan untuk meng-*upgrade* kapasitas website dan server agar mampu menampung trafik tinggi saat diseminasi informasi krusial.
- Strategi konten adaptif: Peningkatan SDM bagi tim diseminasi guna mempelajari tren konten terbaru (seperti video pendek/Reels dll) agar informasi pemerintah tetap relevan bagi generasi muda.
- Pemeliharaan rutin media luar ruang: Menyediakan anggaran pemeliharaan infrastruktur fisik (baliho/videotron) secara berkala guna memastikan fungsi diseminasi non-elektronik tidak terganggu.

Indikator ini mencatatkan kinerja sempurna (100%). Tantangan ke depan bagi Dinkominfo bukan lagi pada "terselenggaranya" diseminasi, melainkan pada efektivitas dan pengaruh (*impact*) dari informasi yang disebarkan terhadap perubahan perilaku atau pemahaman masyarakat.

Tabel 3.19
 Persentase Penanganan Laporan dan Aduan Masyarakat
 Melalui Kanal Aduan Dinkominfo

| Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) | Tahun 2025 | | | Renstra 2025-2029 | | |
|---|--------|--------------------------------|------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target Th 2029 | Realisasi Th 2025 | Capaian Kinerja s/d 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6=5/4*100$ | 7 | 8 | $9=8/7*100$ |
| Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo | % | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Pada tahun 2025 Dinkominfo menetapkan target Persentase Penanganan Laporan dan Aduan Masyarakat sebesar 90%. Target ini disusun dengan mempertimbangkan kompleksitas koordinasi antar-OPD teknis. Namun, dalam pelaksanaannya, Dinkominfo berhasil menunjukkan kinerja sangat baik dengan mencatatkan realisasi sebesar 100%.

Keberhasilan ini menghasilkan capaian kinerja tahunan sebesar 111,11% terhadap target 2025. Angka 100% realisasi ini mengindikasikan bahwa seluruh aduan yang masuk melalui kanal resmi (seperti SP4N-LAPOR!, WAGE, kanal media sosial instansi, maupun aplikasi aduan lokal) telah melalui proses verifikasi, disposisi, dan mendapatkan tindak lanjut secara tuntas oleh instansi berwenang.

Jika disandingkan dengan kinerja tahun 2024, terdapat konsistensi yang sangat kuat di mana realisasi tetap terjaga pada angka 100%. Meskipun volume aduan masyarakat diprediksi meningkat seiring dengan tingginya literasi digital publik, Dinkominfo dapat mempertahankan efektivitas sistem respons cepat (*quick response*). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme manajemen pengaduan bukan lagi sekadar proyek rintisan, melainkan sudah menjadi sistem yang matang (*mature*) dalam struktur birokrasi daerah.

Dalam dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra 2025-2029), target akhir yang dipatok pada tahun 2029 adalah 100%. Dengan capaian

realisasi yang sudah menyentuh angka 100% pada tahun pertama periode Renstra 2025, maka capaian kinerja terhadap Renstra telah mencapai 100%.

Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong

- Integrasi Sistem Nasional & Daerah: Penggunaan platform tunggal yang terintegrasi seperti SP4N-LAPOR! dan WAGE (WA Getaway) mempercepat proses disposisi ke OPD teknis.
- Kekuatan regulasi (SOP Penanganan): Adanya instruksi pimpinan yang mewajibkan respons cepat (maksimal 2x24 jam untuk tanggapan awal) menciptakan budaya kerja yang responsif di seluruh unit kerja.
- Optimalisasi peran admin OPD: Terbentuknya jejaring komunikasi aktif antar-admin pengelola aduan di seluruh OPD
- Edukasi etika melapor: Kampanye publik yang masif mengenai cara melapor yang benar (menyertakan bukti foto dan lokasi) membantu tim admin dalam memproses aduan tanpa perlu melakukan korespondensi berulang untuk verifikasi data.

b. Faktor Penghambat

- Kompleksitas aduan lintas sektoral: Adanya laporan yang melibatkan kewenangan multisektoral (misalnya masalah limbah yang melibatkan industri, lingkungan hidup, dan perizinan) yang secara teknis membutuhkan waktu investigasi lapangan lebih lama.
- Sentimen negatif dan aduan berulang: Masih adanya penggunaan kanal aduan untuk tujuan yang bersifat destruktif atau "spam", yang menguras waktu tim admin dalam melakukan pemfilteran laporan valid.
- Keterbatasan kewenangan teknis: Dinkominfo selaku pengelola kanal aduan seringkali terkendala apabila OPD teknis memiliki keterbatasan anggaran untuk menindaklanjuti aduan fisik (seperti perbaikan jalan rusak berat) di tahun anggaran berjalan.

c. Upaya yang dilakukan

- Penguatan tata kelola dan standarisasi respon (SOP) dengan menetapkan batas waktu respon awal (*initial response*) maksimal 1x24 jam sejak laporan masuk.
- Pemberlakuan sistem *escalation pola*, di mana aduan yang tidak ditanggapi oleh OPD teknis dalam waktu 3 hari kerja akan secara otomatis dilaporkan kepada Sekretaris Daerah atau pimpinan tertinggi untuk mendapatkan atensi khusus.
- Melakukan integrasi data aduan dari berbagai pintu (Media Sosial, WhatsApp, Website, dan Aplikasi) ke dalam satu *dashboard* terpusat. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya aduan yang terlewat (*missed*) atau tumpang tindih (*redundant*).
- Peningkatan kapasitas SDM pengelola aduan (Admin OPD) dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Komunikasi Efektif secara berkala bagi seluruh admin pembantu di tiap OPD. Fokus pelatihan adalah pada teknik penyusunan jawaban yang solutif, humanis, dan tidak kaku (birokratis) guna meningkatkan indeks kepuasan pelapor.
- Pembentukan *Community of Practice* melalui grup koordinasi instan antar-admin untuk mempercepat konsultasi jika ditemukan aduan yang bersifat lintas sektoral atau memerlukan penanganan darurat.
- Pengembangan inovasi teknologi (Rencana mitigasi); Menjajaki pengembangan fitur notifikasi otomatis berbasis WhatsApp kepada pelapor mengenai status progres aduannya, sehingga masyarakat merasa mendapatkan kepastian layanan tanpa harus bertanya berulang kali.

Melalui kombinasi antara ketegasan regulasi (SOP), kecanggihan teknologi (Integrasi sistem), dan pengembangan kompetensi SDM, Dinkominfo berhasil menciptakan ekosistem penanganan aduan yang tidak hanya cepat secara administratif, namun juga substansial dalam memberikan solusi bagi permasalahan masyarakat di lapangan.

Tabel 3.20
Persentase Badan Publik Yang Memenuhi Standar Tata Kelola dan Layanan Informasi Komunikasi Publik

| Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) | Tahun 2025 | | | Renstra 2025-2029 | | |
|---|--------|--------------------------------|------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target Th 2029 | Realisasi Th 2025 | Capaian Kinerja s/d 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6=5/4*100$ | 7 | 8 | $9=8/7*100$ |
| Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik | % | NA | 15 | 28,74 | 100 | 25 | 28,74 | 100 |

Pada tahun anggaran 2025, Dinkominfo menetapkan target awal yang cukup realistis sebesar 15% untuk Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik. Namun, hasil realisasi di lapangan menunjukkan pencapaian yang sangat progresif, yakni sebesar 28,74%. Dengan demikian, capaian kinerja tahunan pada 2025 tercatat sebesar 100% terhadap parameter keberhasilan yang ditetapkan, bahkan secara angka riil telah melampaui target fisik sebesar 13,74%.

Berdasarkan data tabel, pada tahun 2024 indikator ini belum memiliki basis data atau nilai realisasi (NA/Not Available). Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2025 merupakan tahun dimulainya standardisasi formal atau implementasi instrumen penilaian baru terhadap Badan Publik. Lonjakan dari kondisi nihil di 2024 menjadi 28,74% di 2025 menandakan adanya akselerasi kebijakan yang masif dalam penataan informasi publik di awal periode ini.

Dalam dokumen Renstra 2025-2029 target akhir yang ditetapkan pada tahun 2029 adalah sebesar 25%. Sementara realisasi yang dicapai sebesar 28,74% melampaui target akhir Renstra 2029. Dengan demikian, capaian kinerja s/d tahun 2025 terhadap Renstra telah menyentuh 100%. Pencapaian target lebih awal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Badan Publik terhadap standar tata kelola informasi berkembang jauh lebih cepat dari proyeksi awal perencanaan.

a. Faktor Pendorong

- Pendampingan intensif PPID: Upaya Dinkominfo dalam memberikan asistensi teknis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu di setiap Badan Publik berjalan sangat efektif.
- Implementasi Monitoring & Evaluasi (Monev): Adanya instrumen penilaian yang jelas dan transparan memotivasi Badan Publik untuk segera melengkapi standar layanan informasinya agar mendapatkan predikat "Informatif".
- Ketersediaan platform digital yang memudahkan Badan Publik mengunggah dokumen informasi berkala dan setiap saat secara mandiri.
- Komitmen Pimpinan: Instruksi kepala daerah yang mewajibkan transparansi informasi di setiap unit kerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

b. Faktor Penghambat

- Mutasi SDM Pengelola: Pergantian personel pengelola informasi di tingkat Badan Publik seringkali menghambat kontinuitas pengelolaan data karena personel baru memerlukan waktu adaptasi (pelatihan ulang).
- Pemahaman regulasi yang beragam: Masih ditemukannya perbedaan persepsi mengenai klasifikasi informasi (mana yang bersifat terbuka dan mana yang dikecualikan) pada beberapa Badan Publik tertentu.
- Keterbatasan sarana fisik: Beberapa Badan Publik masih terkendala penyediaan ruang layanan informasi fisik yang representatif sesuai standar Komisi Informasi.

c. Upaya yang dilakukan

- Standardisasi Instrumen Penilaian (Monev): Dinkominfo menyusun indikator penilaian yang lebih mendetail dan melakukan pengisian SAQ (*Self Assessment Questionnaire*) secara digital untuk menjamin objektivitas data.
- Bimbingan Teknis PPID: Mengalokasikan anggaran pelatihan khusus untuk pengelola informasi agar memiliki sertifikasi atau pemahaman yang sama mengenai UU Keterbukaan Informasi Publik.

- Uji Konsekuensi Informasi: Melakukan fasilitasi uji konsekuensi secara kolektif bagi Badan Publik untuk menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan secara legal dan akurat.

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2025 telah berhasil mewujudkan tata kelola informasi yang mudah, murah, cepat, tepat, dan valid. Capaian ini menggambarkan Dinkominfo sebagai unit kerja yang responsif dan akuntabel dalam mendukung visi besar transformasi digital dan keterbukaan informasi publik



Gb 3.35

Tim teknis Podcast “*Kepoin Yuk*” sedang mempersiapkan sarana prasarana kebutuhan tapping



Gb 3.36

Liputan berita pada acara kunjungan kerja Kepala Daerah



Gb 3.37

Tim produksi konten tengah melaksanakan editing video



Gb 3.38

Kunjungan Kerja dari LPPL Batik TV Pekalongan ke LPPL Temanggung TV



Gb 3.39

Konsolidasi dan Koordinasi Dinkominfo kepada Karyawan LPPL Temanggung TV



Gb 3.40

Kunjungan Kerja LPPL Radio Kutai Kartanegara ke Radio eRTe FM



Gb 3.41

Program School Visit eRTe FM



Gb 3.42

Edukasi Pemanfaatan Teknologi dan Media Sosial Secara Positif kepada para Pelajar



Gb 3.43

Edukasi kepada Komunitas Masyarakat Terkait Optimalisasi Media Digital



Gb 3.44

Bimtek dan Workshop Jurnalistik dan Pengelolaan Media kepada Kelompok Ilmiah Remaja di Sekolah-sekolah



Gb 3.45

Sosialisasi Program INCAKAP (Internet Cerdas Kreatif Produktif) di Sekolah Menengah Pertama, Seminggu Sekali



Gb 3.46

Bimtek dan Workshop Produksi Konten dan Pengelolaan Media Digital kepada Pelaku UMKM



Gb 3.47

Bimtek dan Workshop Produksi Konten dan Pengelolaan Media Digital kepada Mahasiswa KKN

Tabel 3.21
 Capaian Kinerja Program 2
 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

| Program 2: Sasaran Program : Terselenggaranya Layanan dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------------------------------|------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| No | Indikator Program | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) | Tahun 2025 | | | Renstra 2025-2029 | | |
| | | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target Th 2029 | Realisasi Th 2025 | Capaian Kinerja s/d 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $7=6/5*100$ | 8 | 9 | $10=9/8*100$ |
| 1 | Persentase layanan publik secara elektronik | % | 91,6 | 55 | 55,73 | 100 | 100 | 55,73 | 55,73% |
| 2 | Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 3 | Persentase rumah tangga dengan akses internet | % | 0 | 91 | 94,24 | 100 | 93 | 94,24 | 100% |
| Rata-Rata Capaian Kinerja Program 2 | | | 63,87 | | | 100 | | | 85,24% |

Berdasarkan tren capaian tabel diatas, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika menunjukkan kesiapan yang matang dalam menghadapi target Rencana Strategis 2029. Meskipun rata-rata capaian kumulatif saat ini berada di angka 85,24%, terdapat beberapa poin strategis yang menjadi fokus perhatian ke depan:

Pertama, pada indikator Layanan Publik secara Elektronik, tantangan utama terletak pada integrasi sistem antar-unit kerja. Walaupun realisasi tahunan sudah memenuhi target 100% dari target tahunan, akselerasi diperlukan untuk mencapai angka 100% secara total di tahun 2029. Upaya ini akan difokuskan pada standarisasi aplikasi dan penyederhanaan proses bisnis birokrasi agar lebih adaptif terhadap sistem digital.

Kedua, keberhasilan mempertahankan kinerja infrastruktur TIK di angka 100% harus dibarengi dengan penguatan aspek keamanan siber (*cyber security*). Seiring dengan meningkatnya beban integrasi layanan, keandalan infrastruktur tidak hanya diukur dari ketersediaan jaringan, tetapi juga

ketahanan terhadap ancaman data untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Ketiga, tingginya Akses Internet Rumah Tangga (94,24%) memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk memperluas jangkauan program literasi digital. Dengan masyarakat yang sudah terkoneksi secara infrastruktur, fokus selanjutnya adalah memastikan masyarakat mampu memanfaatkan layanan elektronik pemerintah secara produktif dan aman.

Tabel-tabel dan uraian di bawah ini menyajikan evaluasi kinerja Program Pengelolaan Aplikasi Informatika tahun 2025, tren pertumbuhan tahunan, serta kesiapan infrastruktur dan layanan dalam memenuhi target strategis periode 2025-2029.

Tabel 3.22
Persentase layanan publik secara elektronik

| Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) | Tahun 2025 | | | Renstra 2025-2029 | | |
|---|--------|--------------------------------|------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target Th 2029 | Realisasi Th 2025 | Capaian Kinerja s/d 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6=5/4*100$ | 7 | 8 | $9=8/7*100$ |
| Persentase layanan publik secara elektronik | % | 91,6 | 55 | 55,73 | 100 | 100 | 55,73 | 55,73% |

Pada tahun 2025, indikator Persentase Layanan Publik secara Elektronik ditetapkan dengan target sebesar 55%. Berdasarkan data realisasi, program ini berhasil mencapai angka 55,73%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini pada tahun berjalan adalah sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 yang tercatat sebesar 91,6%, terdapat penyesuaian angka realisasi di tahun 2025 menjadi 55,73%. Penurunan angka persentase ini secara teknis menunjukkan adanya penyesuaian basis data atau standardisasi baru dalam pengintegrasian layanan publik elektronik yang lebih selektif sesuai dengan parameter teknis yang ditetapkan pada awal periode Renstra baru.

Target akhir yang harus dicapai pada tahun 2029 adalah sebesar 100%. Hingga akhir tahun 2025, realisasi kumulatif telah mencapai 55,73%. Hal ini menunjukkan bahwa progres pencapaian terhadap sasaran jangka panjang

telah melampaui separuh jalan dari target akhir, dengan sisa gap sebesar 44,27% yang akan diakselerasi dalam empat tahun ke depan.

Keberhasilan pencapaian target ini pada tahun 2025 didasarkan pada interaksi kompleks antara dukungan kebijakan dan tantangan teknis di lapangan sebagaimana analisis berikut:

a) Faktor Pendorong

- Akselerasi Integrasi SPBE Nasional:

Adanya mandat kebijakan nasional mengenai keterpaduan layanan digital menjadi katalisator utama dalam memecah kebuntuan birokrasi. Hal ini memperkuat posisi pengelola informatika dalam mengoordinasikan penyatuan layanan antar unit kerja ke dalam satu ekosistem digital yang koheren.

- Optimalisasi Infrastruktur Cloud & Pusat Data:

Pemanfaatan teknologi *Cloud Computing* yang stabil dan terpusat telah memangkas waktu siklus pengembangan (*development cycle*). Ketersediaan infrastruktur ini memungkinkan pengembang aplikasi untuk melakukan *deployment* layanan publik baru secara cepat, skalabel, dan efisien tanpa terkendala keterbatasan perangkat keras fisik.

- Regulasi Tata Kelola Data:

Adanya regulasi yang jelas mengenai standar data dan interoperabilitas memastikan setiap aplikasi yang dibangun memiliki bahasa teknis yang sama, sehingga proses integrasi sistem dapat berjalan lebih sistematis.

b) Faktor Penghambat

- Budaya kerja ego sektoral:

Tantangan terbesar bukan pada aspek teknis, melainkan pada resistensi organisasi. Masih adanya kecenderungan unit kerja untuk mengoperasikan aplikasi mandiri secara eksklusif menghambat terciptanya portal layanan publik yang benar-benar terintegrasi (menghasilkan fragmentasi layanan)

- Legacy systems & kesenjangan standar keamanan:
Banyaknya aplikasi warisan (*legacy systems*) yang dibangun dengan arsitektur lama menjadi hambatan dalam aspek keamanan. Aplikasi-aplikasi ini memerlukan proses *refactoring* atau perombakan total agar memenuhi standar keamanan informasi terkini dan protokol enkripsi data yang memadai sebelum diintegrasikan ke sistem pusat.
 - Dinamika ancaman siber:
Peningkatan upaya digitalisasi berbanding lurus dengan meningkatnya risiko serangan siber, yang menuntut alokasi sumber daya ekstra untuk pengamanan dibandingkan sekadar pengembangan fitur.
- c) Upaya yang dilakukan
- Penyelarasan arsitektur aplikasi dan rasionalisasi sistem:
Melakukan audit menyeluruh dan pemetaan ulang terhadap arsitektur aplikasi. Langkah ini bertujuan untuk mengeliminasi aplikasi yang tumpang tindih (*redundant*) dan memastikan setiap aplikasi baru terhubung dalam peta jalan integrasi yang sudah ditetapkan.
 - Penguatan kapabilitas SDM dan literasi digital:
Melaksanakan program peningkatan kompetensi teknis bersertifikasi bagi pengelola aplikasi dan admin sistem. Fokus utama adalah pada manajemen insiden dan keberlangsungan layanan (*IT Service Management*) untuk meminimalisir potensi *downtime* pada layanan publik elektronik.
 - Audit keamanan informasi berkala:
Mengadopsi standar keamanan internasional dalam setiap tahapan pengembangan aplikasi guna memastikan data publik terlindungi secara maksimal di tengah proses integrasi yang masif.

Tabel 3.23
Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik

| Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) | Tahun 2025 | | | Renstra 2025-2029 | | |
|--|--------|--------------------------------|------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target Th 2029 | Realisasi Th 2025 | Capaian Kinerja s/d 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6=5/4*100$ | 7 | 8 | $9=8/7*100$ |
| Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |

Indikator Persentase Kinerja Infrastruktur TIK yang Baik pada tahun 2025 menetapkan target sebesar 100%. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi teknis, realisasi indikator ini berhasil mencapai angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh infrastruktur pendukung teknologi informasi dan komunikasi berada dalam kondisi prima dan beroperasi secara optimal, dengan tingkat capaian kinerja tahunan mencapai 100%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang juga berada di angka 100%, Dinkominfo berhasil mempertahankan konsistensi performa infrastruktur secara berkelanjutan. Keberhasilan menjaga angka maksimal selama dua tahun berturut-turut mencerminkan manajemen aset TIK yang sangat stabil dan sistem pemeliharaan yang berjalan sesuai prosedur standar.

Hingga akhir tahun 2025, realisasi kumulatif telah mencapai 100%, yang berarti target akhir periode Renstra 2029 (100%) telah terpenuhi secara fungsional. Fokus ke depan bukan lagi sekadar mencapai angka tersebut, melainkan menjaga resiliensi dan memodernisasi infrastruktur agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi hingga tahun 2029.

Capaian sempurna ini merupakan hasil dari sinergi tata kelola teknologi yang baik dan kesiapan sumber daya yang mumpuni. Sebagai bagian dari upaya menjaga resiliensi infrastruktur TIK, berikut dipaparkan faktor-faktor yang menjadi kekuatan utama program, serta komitmen strategis dalam mengatasi setiap potensi hambatan guna mencapai target jangka panjang.

a) Faktor Pendorong

- Sistem monitoring real-time:
Penggunaan perangkat lunak monitoring infrastruktur yang bekerja 24/7 memungkinkan tim teknis mendeteksi dan menangani gangguan kecil sebelum berdampak pada layanan publik.
- Pemeliharaan preventif yang terjadwal:
Kedisiplinan dalam melakukan pemeliharaan rutin pada perangkat keras, server, dan jaringan memastikan masa pakai aset lebih lama dan meminimalisir risiko kerusakan mendadak.
- Cadangan daya yang memadai:
Ketersediaan UPS dan generator di pusat data menjamin keberlangsungan infrastruktur TIK meskipun terjadi gangguan pada suplai listrik utama.

b) Faktor Penghambat

- Depresiasi perangkat teknis:
Beberapa komponen infrastruktur mulai memasuki fase kedaluwarsa (*end-of-life*).
- Ancaman faktor eksternal:
Risiko gangguan fisik seperti fluktuasi tegangan listrik ekstrim atau gangguan cuaca yang dapat memengaruhi efisiensi perangkat keras di lapangan.

c) Upaya yang dilakukan

- Modernisasi infrastruktur secara bertahap:
Melakukan penggantian perangkat jaringan dan server lama dengan teknologi terbaru yang lebih hemat energi dan memiliki performa lebih tinggi.
- Penguatan Disaster Recovery Center (DRC):
Mengoptimalkan fungsi pusat pemulihan data untuk menjamin ketersediaan layanan (*high availability*) jika terjadi kegagalan sistem pada infrastruktur utama.

- Peningkatan Kapasitas Bandwidth:
Melakukan manajemen trafik jaringan secara dinamis untuk memastikan distribusi beban akses data tetap seimbang seiring meningkatnya penggunaan layanan elektronik.

Tabel 3.24
Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik

| Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) | Tahun 2025 | | | Renstra 2025-2029 | | |
|---|--------|--------------------------------|------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target Th 2029 | Realisasi Th 2025 | Capaian Kinerja s/d 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6=5/4*100$ | 7 | 8 | $9=8/7*100$ |
| Persentase rumah tangga dengan akses internet | % | 0 | 91 | 94,24 | 100 | 93 | 94,24 | 100% |

Pada tahun 2025, indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet menargetkan angka 93%. Berdasarkan data lapangan, realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 94,24%. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan program dalam memperluas jangkauan konektivitas digital di masyarakat, dengan tingkat capaian kinerja tahun berjalan sebesar 101,33%.

Dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatatkan realisasi sebesar 94,24%, Dinkominfo berhasil mempertahankan tingkat penetrasi internet yang tinggi secara stabil. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur digital di tingkat rumah tangga telah terbentuk dengan kuat dan mampu dipertahankan kualitasnya meskipun terjadi dinamika pertumbuhan jumlah penduduk.

Target akhir yang ditetapkan dalam Renstra 2029 adalah sebesar 100%. Dengan realisasi kumulatif saat ini sebesar 94,24%, program telah mencapai 94,24% dari target jangka panjang tersebut. Progres ini sangat menggembirakan karena hanya menyisakan selisih 5,76% untuk mencapai target tahun 2029.

Keberhasilan dalam melampaui target penetrasi internet ini didukung oleh sinergi yang baik antara penyediaan infrastruktur dan antusiasme adopsi teknologi oleh masyarakat. Berikut adalah faktor-faktor positif yang

mempengaruhi capaian ini serta langkah proaktif untuk menyempurnakan sisa target yang ada:

a) Faktor Pendorong

- Perluasan jaringan infrastruktur digital:
Pembangunan menara telekomunikasi dan penggelaran jaringan serat optik (*fiber optic*) yang semakin masif hingga ke wilayah pedesaan.
- Tersedianya program internet gratis:
Inisiatif penyediaan titik WiFi publik di area strategis dan kantor desa membantu masyarakat mendapatkan akses informasi secara cuma-cuma.
- Tingginya kebutuhan ekonomi digital:
Kesadaran masyarakat akan pentingnya internet untuk kegiatan ekonomi produktif (UMKM digital) menjadi penggerak alami peningkatan akses di tingkat rumah tangga.

b) Faktor Penghambat

- Kondisi geografis yang menantang:
Beberapa wilayah terpencil masih memiliki kendala geografis yang memerlukan investasi infrastruktur lebih tinggi untuk mencapai cakupan 100%.
- Kesenjangan literasi digital:
Meskipun akses fisik tersedia, sebagian kecil kelompok masyarakat masih memerlukan pendampingan untuk memanfaatkan internet secara optimal dan aman.

c) Upaya yang dilakukan

- Penyediaan infrastruktur TIK di wilayah blankspot:
Melakukan pemetaan dan pembangunan infrastruktur khusus pada area yang belum terjangkau sinyal internet secara memadai.
- Program edukasi literasi digital:
Menyelenggarakan kampanye dan pelatihan pemanfaatan internet sehat dan produktif untuk mendorong masyarakat segera beralih ke gaya hidup digital.

- Membangun “titik simpul stabil”:

Penyediaan pusat konektivitas utama yang resilien setiap balai desa atau sekolah yang terhubung dengan jaringan internet yang disediakan Dinkominfo, yang berfungsi sebagai jangkar distribusi jaringan internet dan pengolahan data lokal agar layanan digital tidak terputus di setiap balai desa atau sekolah yang terhubung dengan jaringan internet yang disediakan Dinkominfo. Keberadaan fasilitas publik dengan koneksi stabil ini diharapkan dapat mengompensasi keterbatasan akses internet rumah tangga serta mendukung kegiatan pendidikan, pelayanan administrasi desa, dan aktivitas produktif masyarakat.

Berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap indikator kinerja tahun 2025, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika menunjukkan kinerja yang sangat progresif dengan rata-rata capaian kinerja program mencapai 85,24%. Angka ini merefleksikan keberhasilan instansi dalam mengorkestrasi transformasi digital yang seimbang antara penyediaan infrastruktur, pengembangan layanan, dan perluasan akses masyarakat.

Berikut ini disajikan dokumentasi kegiatan yang merupakan output kegiatan pada program Pengelolaan Aplikasi Informatika tahun 2025.

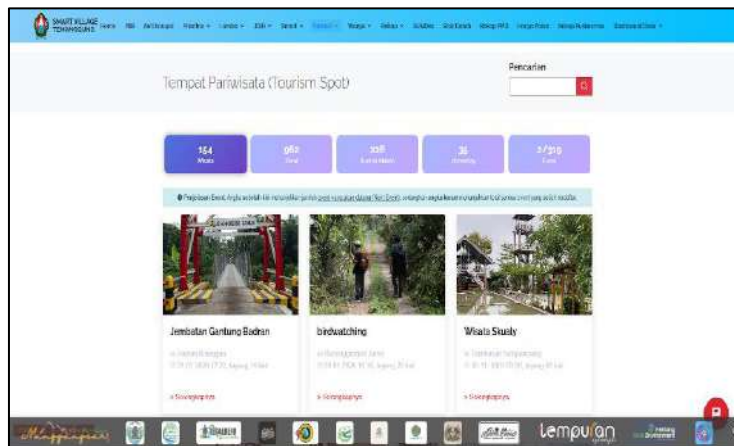


Gb 3.48
Halaman beranda SIDEDI (Sistem Desa Digital)



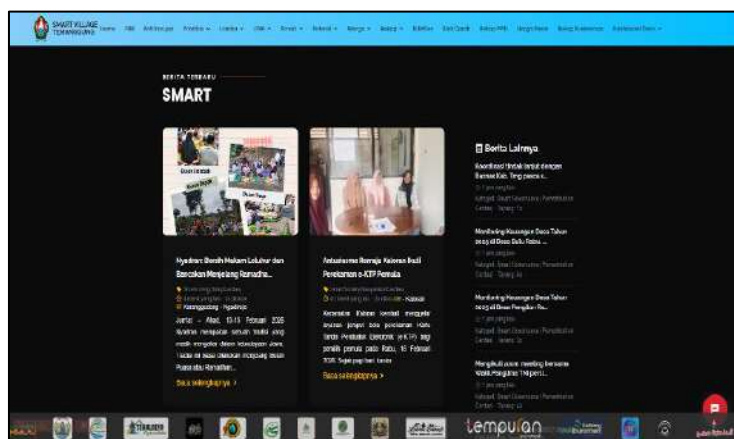
Gb 3.49

Tampilan Integrasi berbagai peta tematik dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data spasial serta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.



Gb 3.50

Tampilan daftar potensi desa dalam format grid foto pada aplikasi SIEDDI (Sistem Desa Digital).



Gb 3.51

Tampilan halaman berita desa dalam format grid pada aplikasi SIEDDI (Sistem Desa Digital).

Keterangan: PRC = Packed Red Cell (sel darah merah pekat) • TC = Thrombocyte Concentrate (konsentrat trombosit) • WB = Whole Blood (darah kultur)

| Tanggal | Golongan A | | | | Golongan B | | | | Golongan O | | | | Golongan AB | | | | Cetak |
|------------|------------|----|----|-------|------------|----|----|-------|------------|----|----|-------|-------------|----|----|-------|-------|
| | PRC | TC | WB | Total | PRC | TC | WB | Total | PRC | TC | WB | Total | PRC | TC | WB | Total | |
| 18/02/2026 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 60 | 65 | 8 | 8 | 52 | 100 | 2 | 0 | 7 | 9 | Cetak |
| 13/02/2026 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | 23 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | Cetak |
| 11/02/2026 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 10 | 19 | 12 | 0 | 24 | 43 | 0 | 1 | 2 | 3 | Cetak |
| 10/02/2026 | 8 | 0 | 17 | 25 | 0 | 6 | 9 | 15 | 2 | 5 | 25 | 33 | 2 | 4 | 0 | 6 | Cetak |
| 09/02/2026 | 8 | 4 | 11 | 23 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 3 | 18 | 21 | 0 | 2 | 3 | 5 | Cetak |

Gb 3.52
Tampilan list stok darah PMI sesuai dengan golongannya



Gb 3.53
Maintenance perangkat jaringan di Data Center Pemkab



Gb 3.54
Pemasangan Access point untuk wifi publik di area Taman Pengayoman



Gb 3.55
Perbaikan jaringan fiber optik



Gb 3.56
Kegiatan pemasangan Access point untuk wifi publik di area Alun-alun
Temanggung

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Program 3
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

| Program 3: Sasaran Program 3: Terselenggaranya Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sesuai peraturan perundangan | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------------------------------|------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| No | Indikator Program | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) | Tahun 2025 | | | Renstra 2025-2029 | | |
| | | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target Th 2029 | Realisasi Th 2025 | Capaian Kinerja s/d 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $7=6/5*100$ | 8 | 9 | $10=9/8*100$ |
| 1 | Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI) | Angka | 0 | 40 | 74,4 | 100 | 65 | 74,4 | 100% |
| 2 | Ketersediaan data statistik sektoral | % | 0 | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| Rata-rata Capaian Kinerja Program 3 | | | 0,00 | | | 100 | | | 100% |

Berdasarkan data pada Tabel 3.25 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral menunjukkan kinerja yang sangat bagus dengan rata-rata capaian kinerja mencapai 100% pada tahun 2025. Angka ini mencerminkan keberhasilan total dalam memenuhi seluruh target program yang telah ditetapkan untuk tahun berjalan.

Pencapaian rata-rata maksimal ini didorong oleh dua indikator utama yang menunjukkan progres melampaui ekspektasi, yaitu; Nilai Evaluasi SDI dengan realisasi nilai sebesar 74,4, dan Indikator ketersediaan data sektoral mencapai realisasi 100%. Capaian ini memastikan seluruh variabel dalam program ini memiliki skor sempurna dalam penghitungan rata-rata kinerja.

Data dan uraian berikut menyajikan rincian perkembangan statistik sektoral tahun 2025, evaluasi tren pertumbuhan tahunan, serta proyeksi strategis dalam memenuhi komitmen Satu Data Indonesia pada akhir periode Renstra 2029.

Tabel 3.26
Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)

| Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) | Tahun 2025 | | | Renstra 2025-2029 | | |
|--|--------|--------------------------------|------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target Th 2029 | Realisasi Th 2025 | Capaian Kinerja s/d 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6=5/4*100$ | 7 | 8 | $9=8/7*100$ |
| Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI) | Angka | 0 | 40 | 74,4 | 100 | 65 | 74,4 | 100% |

Indikator Nilai Evaluasi SDI pada periode 2025 mematok target angka 40. Melalui serangkaian transformasi tata kelola data, instansi berhasil membukukan nilai realisasi yang sangat progresif sebesar 74,4. Capaian yang melampaui target ini mengonfirmasi efektivitas operasional yang optimal, di mana realisasi 100% menjadi bukti nyata dari percepatan penyeragaman standar data di seluruh unit kerja.

Pada tahun 2024, realisasi Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI) sudah ada namun belum memiliki target karena pada tahun tersebut belum ditetapkan menjadi Indikator Kinerja dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, baru pada dokumen RPJMD 2025-2029 Dinkominfo mulai menerapkan indikator ini dan menetapkan target awal sebesar 40. Dalam pelaksanaannya realisasi yang dicapai melampaui target dengan angka 74,40. Keberhasilan melampaui target sebesar 86% dari angka dasar yang ditetapkan menghasilkan persentase capaian 100% secara administratif.

Perbandingan perolehan Nilai Evaluasi SDI kedua tahun ini menunjukkan perubahan status menjadi berkinerja tinggi. Keberhasilan meraih nilai 74,40 pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Dinkominfo tidak hanya sekedar memenuhi syarat administratif, tetapi telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia seperti pemenuhan standar data, penggunaan metadata, penerapan interoperabilitas data dan penggunaan kode referensi/data induk secara baik.

Pencapaian tahun 2025 telah melampaui ekspektasi akhir Renstra 2029 yang ditetapkan sebesar 65. Hal ini menegaskan bahwa target strategis lima

tahunan telah terpenuhi lebih dini. Dengan tingkat capaian kumulatif 100%, fokus pada periode mendatang akan bergeser dari "pencapaian target" menjadi "penguatan kualitas dan keberlanjutan" tata kelola data yang telah terbentuk.

Keberhasilan mencapai nilai evaluasi 74,4 dan ketersediaan data 100% pada tahun pertama penetapan indikator ini dipengaruhi oleh dinamika faktor berikut:

a) Faktor Pendorong

- Soliditas kolaborasi tripartit:

Terjalannya kemitraan strategis yang harmonis antara BPS selaku Pembina Data, Dinkominfo selaku Walidata, dan Bappeda selaku Koordinator Data dalam menyinkronkan standar data daerah.

- Mandat regulasi yang kuat:

Adanya regulasi tingkat daerah terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang memberikan landasan hukum bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyetorkan data secara rutin.

- Ketersediaan infrastruktur portal data:

Pemanfaatan platform berbagi pakai data yang terintegrasi memudahkan proses pengumpulan, validasi, hingga publikasi data sektoral dalam satu pintu.

b) Faktor Penghambat

- Variasi kompetensi pengelola data:

Belum meratanya pemahaman teknis mengenai penyusunan Metadata Statistik ditingkat operator OPD, sehingga memerlukan proses asistensi yang berulang.

- Indikator baru yang kompleks:

Sebagai indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2025 bagi Dinkominfo, diperlukan waktu adaptasi untuk menyelaraskan instrumen penilaian nasional dengan kondisi data eksisting di lapangan.

- Keterbatasan sumber data real-time:

Sebagian data sektoral masih dikelola secara manual oleh produsen data, sehingga proses otomatisasi ke portal Satu Data belum berjalan maksimal di seluruh sektor.

c) Upaya yang dilakukan

- Penyelenggaraan desk & asistensi Metadata:
Dinkominfo secara aktif melakukan pendampingan langsung (*coaching clinic*) kepada admin data di setiap OPD untuk memastikan data yang diproduksi memenuhi standar kualitas SDI.
- Penguatan Forum Satu Data Kabupaten:
Mengintensifkan pertemuan rutin forum data untuk memecahkan hambatan sinkronisasi data antar-sektoral dan mempercepat kliring data.
- Rasionalisasi dan Pembersihan Data:
Melakukan audit dan verifikasi terhadap data-data lama untuk memastikan hanya data valid dan mutakhir yang dipublikasikan ke dalam sistem.
- Sosialisasi Literasi Statistik:
Memberikan edukasi berkelanjutan mengenai pentingnya statistik sektoral bagi perencanaan pembangunan agar partisipasi OPD sebagai produsen data meningkat.

Tabel 3.27
Ketersediaan Data Statistik Sektoral

| Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) | Tahun 2025 | | | Renstra 2025-2029 | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------|------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target Th 2029 | Realisasi Th 2025 | Capaian Kinerja s/d 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6=5/4*100$ | 7 | 8 | $9=8/7*100$ |
| Ketersediaan data statistik sektoral | % | 0 | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |

Tabel diatas menunjukkan bahwa Indikator Ketersediaan Data Statistik Sektoral mendapatkan kinerja yang sangat stabil dan konsisten pada level maksimal. Pada tahun 2024 Dinkominfo menetapkan target penuh sebesar 100% dan berhasil merealisasikannya secara sempurna 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan data statistik sektoral pada tahun tersebut telah terpenuhi dan tersedia untuk publik maupun perencanaan pembangunan.

Namun pada tahun 2025 sesuai RPJMD 2025-2029 indikator ini terdapat penyesuaian target yang lebih moderat, yaitu sebesar 74%. Dan dalam pelaksanaannya Dinkominfo mampu melampaui target tersebut dengan tetap mempertahankan realisasi di angka 100%.

Pencapaian sebesar 100% ditahun 2025 ini secara teknis telah memenuhi target akhir Renstra tahun 2029 yang juga ditetapkan sebesar 100%. Dengan tercapainya target jangka panjang ini lebih awal, maka capaian kumulatif hingga tahun 2025 telah menyentuh angka 100%. Proyeksi ke depan tidak lagi sekadar mengejar pemenuhan target, melainkan berfokus pada penjagaan konsistensi ketersediaan data agar tetap lengkap dan mutakhir setiap tahunnya hingga akhir periode Renstra.

Keberhasilan dalam mencapai target kinerja yang optimal pada tahun 2025 merupakan hasil dari sinergi tata kelola yang terukur serta responsivitas terhadap dinamika teknologi informasi. Guna mempertahankan tren positif dan memastikan tercapainya target Renstra 2029, berikut dipaparkan aspek-aspek yang memengaruhi capaian tersebut:

a) Faktor Pendorong

- Dukungan kepemimpinan:

Adanya komitmen dan dukungan kuat dari pimpinan daerah terhadap implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) serta akselerasi program *Smart City*.

- Ketepatan strategi data:

Adanya penetapan data prioritas di Kabupaten Temanggung yang disusun secara cermat dengan mempertimbangkan ketersediaan data riil dari para Produsen Data.

b) Faktor Penghambat

- Dinamika kebijakan:

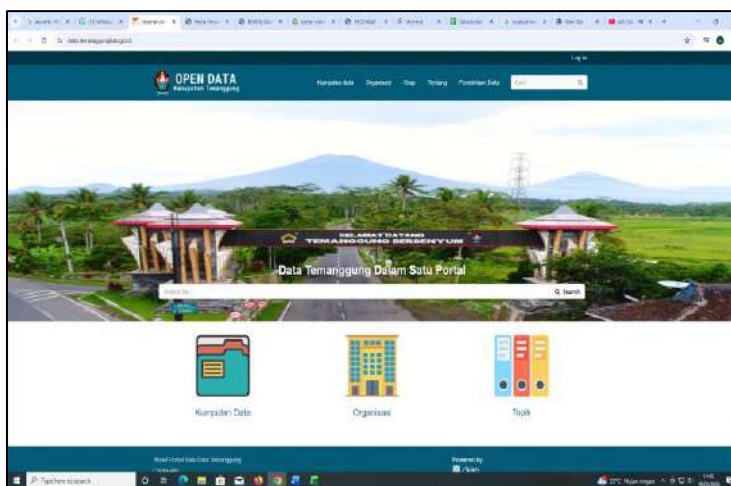
Munculnya perubahan kebijakan kewenangan dalam jangka pendek yang memengaruhi konsistensi Produsen Data dalam menghasilkan data yang telah direncanakan sebelumnya.

- Keamanan Siber:
Adanya ancaman keamanan data yang terus berkembang, sehingga menuntut pemeliharaan infrastruktur dan kewaspadaan yang dilakukan secara terus-menerus.
- c) Upaya yang dilakukan
- Peningkatan kapasitas SDM:
Menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) secara berkala bagi pengelola data dan aplikasi di setiap OPD guna menjamin keseragaman standar teknis dan kualitas data.
 - Integrasi sistem layanan:
Melakukan konsolidasi berbagai aplikasi layanan publik ke dalam satu platform terpadu agar lebih aksesibel dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi.
 - Penguatan Forum Satu Data:
Mengoptimalkan pertemuan Forum Data sebagai sarana percepatan proses verifikasi, validasi, serta sinkronisasi data antar-instansi guna menjamin akuntabilitas data sektoral.

Berdasarkan evaluasi terhadap realisasi indikator kinerja pada tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral telah mencapai tingkat kematangan yang sangat luar biasa dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100%. Program ini berhasil melakukan akselerasi besar dalam mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi di Kabupaten Temanggung.

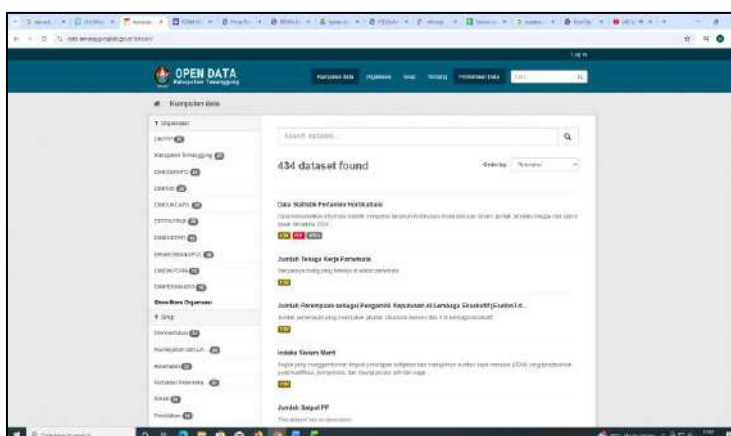
Mengingat target jangka panjang telah tercapai, fokus utama pada periode 2026-2029 tidak lagi hanya pada pemenuhan kuantitas, melainkan pada penjagaan konsistensi pemutakhiran data, penguatan keamanan siber, dan perluasan pemanfaatan data bagi masyarakat luas guna mendukung keberlanjutan ekosistem *Smart City*.

Berikut ini disajikan dokumentasi kegiatan yang merupakan output kegiatan pada program Penyelenggaraan Statistik Sektoral tahun 2025.



Gb 3.57

Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung dengan laman data.temanggungkab.go.id



Gb 3.58

Front end portal SDI Kabupaten Temanggung yang berisi kumpulan data dan Produsen Data

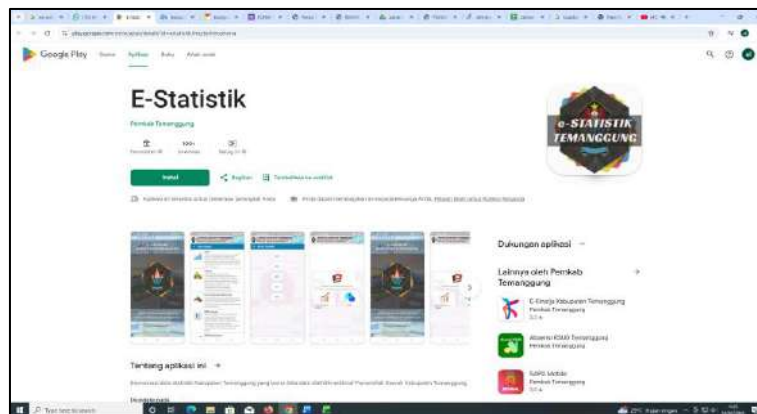


Gb 3.59

Buku Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2025



Gb 3.60
Front end geoportals Kabupaten Temanggung



Gb 3.61
Tampilan E-Statistik, aplikasi berbasis android yang dapat diunduh melalui Play Store



Gb 3.62
Pembinaan Statistik Sektorial kepada perangkat daerah yang dilakukan Dinkominfo bekerjasama dengan BPS Kabupaten Temanggung

Pelaksanaan Statistik Sektorial 2025 di Dinkominfo Temanggung menghasilkan ekosistem data yang akuntabel. Melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data serta penggunaan kode referensi/ data induk, data statistik sektorial Kabupaten Temanggung mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan pemenuhan kebutuhan data.

Tabel 3.28
Capaian Kinerja Program 4
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

| Program 4: Sasaran Program 4: Terselenggaranya Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sesuai peraturan perundangan | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------------------------------|------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| No | Indikator Program | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) | Tahun 2025 | | | Renstra 2025-2029 | | |
| | | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target Th 2029 | Realisasi Th 2025 | Capaian Kinerja s/d 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $7=6/5*100$ | 8 | 9 | $10=9/8*100$ |
| 1 | Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah | Angka | 87,67 | 600 | 548 | 91,33 | 800 | 548 | 69% |
| 2 | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| Rata-rata Capaian Kinerja Program 4 | | | 93,84 % | | | 95,67 % | | | 84,25 % |

Secara keseluruhan, kinerja Program Penyelenggaraan Persandian pada tahun 2025 menunjukkan efektivitas yang tinggi dengan rata-rata capaian sebesar 95,67%. Angka ini merepresentasikan keberhasilan Dinkominfo dalam menjalankan fungsi perlindungan data dan informasi serta penguatan infrastruktur persandian di lingkungan pemerintah daerah. Poin yang paling menonjol dalam adalah lompatan target pada indikator Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah. Pada tahun 2024, indeks berada di angka 300 dengan capaian 87,67%, namun pada tahun 2025 target ditingkatkan secara agresif menjadi 600. perubahan target ini disebabkan karena perubahan versi

dari Indeks KAMI yang digunakan untuk penilaian dari versi 4.2 dengan nilai maksimal 645 point menjadi indeks KAMI versi 5.0 dengan nilai Maksimal 916 point, sehingga target yang tadinya 300 point menjadi 600 point.

Pada indikator Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah, kinerja instansi menunjukkan stabilitas yang baik. Dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%, Dinkominfo berhasil mempertahankan predikat kinerjanya dari tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh protokol pengamanan informasi yang bersifat rutin dan mendasar telah terpenuhi.

Uraian mendalam mengenai realisasi tiap indikator di bidang pengamanan informasi tahun 2025, evaluasi perbandingan terhadap capaian tahun lalu, serta peta jalan menuju target ketahanan siber pada akhir Renstra 2029 dipaparkan dalam tabel dan penjelasan berikut.

Tabel 3.29
Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

| Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) | Tahun 2025 | | | Renstra 2025-2029 | | |
|---|--------|--------------------------------|------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target Th 2029 | Realisasi Th 2025 | Capaian Kinerja s/d 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6=5/4*100$ | 7 | 8 | $9=8/7*100$ |
| Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah | Angka | 87,67 | 600 | 548 | 91,33 | 800 | 548 | 69% |

Pada tahun 2025, Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah ditargetkan mencapai skor 600. Berdasarkan realisasi di lapangan, skor yang berhasil diraih adalah 548 dengan persentase capaian kinerja tahunan berada pada angka 91,33%. Meskipun belum mencapai target maksimal, angka ini menunjukkan tingkat keamanan informasi yang berada pada kategori baik.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang sebesar 87,67%, terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2025 (91,33%). Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem tata kelola dan perlindungan data pemerintah daerah.

Target akhir yang ditetapkan pada tahun 2029 adalah skor 800. Dengan realisasi saat ini sebesar 548, maka progres pencapaian terhadap target jangka

panjang Renstra hingga tahun 2025 adalah sebesar 69%. Pemerintah daerah masih memiliki selisih 252 poin yang harus dikejar dalam empat tahun ke depan.

Salah satu poin paling krusial dalam laporan tahun ini adalah adanya lonjakan target yang sangat signifikan. Pada tahun 2024 target yang ditetapkan hanya sebesar 300, namun di tahun 2025, target tersebut melompat 100% menjadi 600. Kenaikan drastis ini bukan sekadar peningkatan ambisi, melainkan implikasi langsung dari pemberlakuan Indeks KAMI Versi 5.0 sesuai instruksi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Versi 5.0 membawa standar penilaian yang lebih luas, ketat, dan mutakhir, menyesuaikan dengan standar internasional ISO/IEC 27001:2022. Instrumen baru ini menuntut pemenuhan parameter yang lebih detail pada area tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, serta keamanan teknologi dan infrastruktur siber.

Pencapaian Indeks KAMI pada periode ini dipengaruhi oleh berbagai dinamika internal maupun eksternal. Berikut adalah rincian faktor pendorong, tantangan yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang tengah dijalankan:

1) Faktor Pendorong:

- Tingginya komitmen pimpinan dalam pengalokasian anggaran keamanan siber.
- Penerapan standar ISO 27001 pada beberapa layanan digital utama.
- Meningkatnya kesadaran aparatur mengenai keamanan data.

2) Faktor Penghambat:

- Masih terbatasnya jumlah SDM ahli di bidang keamanan informasi.
- Ancaman serangan siber yang semakin kompleks dan dinamis (seperti *ransomware*).
- Infrastruktur pendukung di beberapa unit kerja yang belum sepenuhnya terstandarisasi.

3) Upaya yang Dilakukan:

- Melakukan audit keamanan informasi secara berkala dan rutin melakukan *vulnerability assessment*.
- Menyelenggarakan pelatihan teknis dan sertifikasi bagi pengelola TI.
- Memperkuat kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam pemantauan trafik data.

Secara keseluruhan, kinerja Indeks KAMI Pemerintah Daerah pada tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat progresif dan adaptif. Meskipun terdapat lonjakan target yang signifikan dari skor 300 di tahun 2024 menjadi 600 di tahun 2025 akibat transisi ke Versi 5.0 sesuai mandat BSSN, pemerintah daerah mampu merespons perubahan tersebut dengan capaian sebesar 91,33%.

Tabel 3.30
Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

| Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2024 (%) | Tahun 2025 | | | Renstra 2025-2029 | | |
|---------------------------------------|--------|--------------------------------|------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Target Th 2029 | Realisasi Th 2025 | Capaian Kinerja s/d 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6=5/4*100$ | 7 | 8 | $9=8/7*100$ |
| Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |

Pada tahun anggaran 2025, indikator Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah menetapkan target sebesar 100%. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi yang dicapai adalah 100%, yang berarti capaian kinerja tahunan mencapai angka sempurna yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh parameter keamanan informasi yang direncanakan untuk tahun tersebut telah terpenuhi sepenuhnya.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 yang juga sebesar 100%, performa pada tahun 2025 menunjukkan konsistensi kinerja yang terjaga. Pemerintah berhasil mempertahankan standar keamanan informasi pada level maksimal selama dua tahun berturut-turut, yang mengindikasikan stabilitas sistem proteksi data dan informasi yang kuat.

Dalam dokumen 2025-2029 target akhir tahun 2029 ditetapkan sebesar 100%. Dengan realisasi s/d tahun 2025 yang sudah mencapai 100%, maka capaian kinerja terhadap Renstra adalah 100%. Secara administratif, target jangka menengah telah tercapai di tahun pertama periode Renstra, sehingga fokus selanjutnya adalah pada aspek *maintenance* (pemeliharaan) dan peningkatan kualitas sistem yang sudah ada.

Keberhasilan pencapaian target kinerja Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah yang menyentuh angka sempurna ini tidak terlepas dari interaksi berbagai elemen strategis, baik dari sisi teknis maupun manajerial, yang diuraikan dalam poin-poin berikut:

1) Faktor Pendorong:

Keberhasilan ini didukung penuh oleh komitmen pimpinan dalam menetapkan aturan keamanan informasi yang jelas. Selain itu, penggunaan teknologi perlindungan data yang modern serta tingginya kesadaran pegawai dalam menjaga kerahasiaan data menjadi kunci utama sistem tetap aman dan berjalan stabil.

2) Faktor Penghambat:

Tantangan utama yang muncul Adalah serangan siber yang jenisnya terus berubah dan semakin pintar setiap harinya. Selain itu, masih terbatasnya jumlah tenaga ahli di bidang keamanan digital serta adanya ketergantungan pada sistem pihak luar yang terkadang memiliki celah keamanan sendiri.

3) Upaya yang dilakukan:

Untuk menjaga performa tersebut, pemerintah rutin melakukan uji coba keamanan (audit) pada sistem dan memperkuat tim tanggap darurat siber. Selain itu, dilakukan pelatihan rutin bagi staf IT agar selalu siap menghadapi ancaman terbaru serta penyediaan cadangan data (backup) agar layanan publik tidak terganggu jika terjadi kendala teknis.

Sebagai urat nadi keamanan digital di lingkup pemerintah daerah, Dinkominfo Kabupaten Temanggung melalui fungsi Persandian menghasilkan output yang bersifat strategis dan teknis. Output ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh transformasi digital di Kabupaten Temanggung berdiri di atas fondasi yang aman dan tepercaya.



Gb 3.63

Sosialisasi dan Pendampingan Penerbitan TTE di Dikpora.



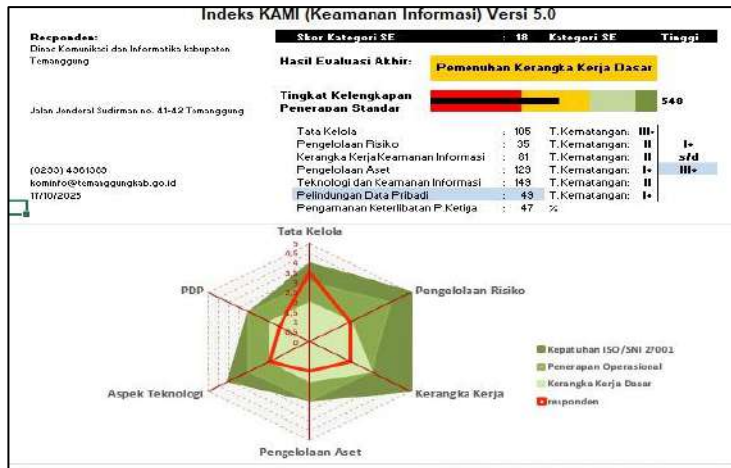
Gb 3.64

Sosialisasi dan pendampingan Penerbitan TTE PPPK Paruh waktu Dinas Pekerjaan Umum



Gb 3.65

Bimbingan Teknis bagi anggota CSIRT Temanggungkab yang berasal dari 46 Perangkat Daerah dan Kecamatan



Gb 3.66
Dashboard score indeks KAMI versi 5.0.

Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)

Identitas Instansi atau Perusahaan: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung

Alamat: Jalan Jenderal Sudirman no. 41-42 Temanggung

Nomor Telpon: (0293) 4361389

Email: kominfo@temanggungkab.go.id

Pengisi Lembar Evaluasi: Handono, S.T.
Jabatan: Sandiman Ahli Muda

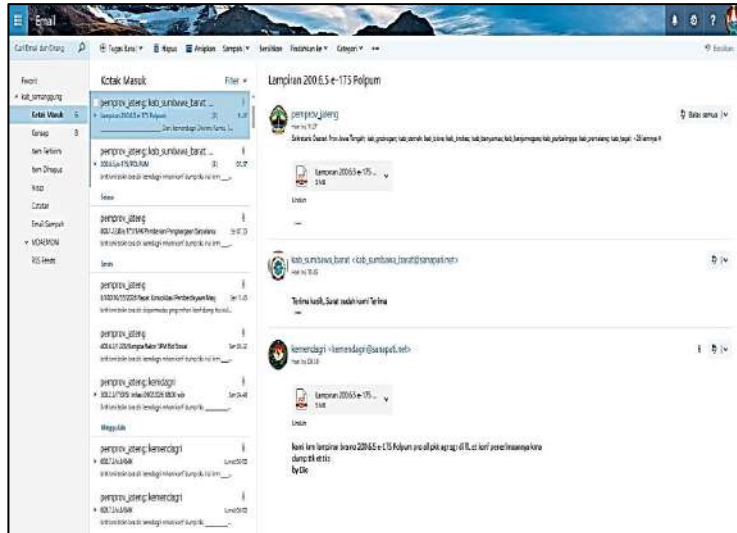
Tanggal Pengisian: 17/10/2025

Deskripsi Ruang Lingkup: Isi dengan deskripsi ruang lingkup struktur organisasi (Departemen, Bagian atau Satuan Kerja) dan infrastruktur TIK

Gb 3.67
Pengisian dan penilaian Indeks KAMI secara mandiri



Gb 3.68
Laporan Hasil Uji Vulnerability Assesment (VA)



Gb 3.69

Screenshoot email yang terenkripsi dengan email sanapati

| Kopoda Yth : Kepala Dinas | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------|-----------------|------------------|-----------|-------------|------------|---------|----------------------------|------------|----------------|-----------------|---|--|--|
| Dari : Kepala Bidang Statistik dan Persandian | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal : 3 Januari 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perihal : Laporan Rekap Surat Masuk dan Email Sanapati Bulan Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | TGL AGENDA | PENERIMAAN | | | | | | | | | | SALINAN/PAK | | | |
| | | KEPADA | DAIRI | SISTEM/RESTRUKSI | MULAI JAM | SELESAI JAM | OLEH | JML HAL | NO ASLI | TGL SURAT | KEPADA | DAIRI | PEJABAT | | |
| 1 | 03/11/2025 | Rappoda Kab | Rappoda Prov | EMAIL SANAPATI | 13,38 | 13,48 | STAF SANDI | 5 Hal | 5/000.7.2/25/7/2025 | 31/10/2025 | Rappoda Kab | Rappoda Prov | Undangan FGD Strategi Penetapan Prioritas dan Target Sanitasi | | |
| 2 | 03/11/2025 | Dinkominfo Kab | Dinkominfo Prov | EMAIL SANAPATI | 14,47 | 14,57 | STAF SANDI | 5 Hal | 5/400.0.3.A/64/2025 | 31/09/2025 | Dinkominfo Kab | Dinkominfo Prov | Perencanaan Publikasi Aplikasi Jaring Rappoda Ngklat | | |
| 3 | 03/11/2025 | BUPATI | Kemendagri | EMAIL SANAPATI | 15,18 | 15,28 | STAF SANDI | 1 Hal | 500.2.3/2025/JS | 31/01/2025 | BUPATI | Kemendagri | Raker Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah Program 3 Jala Rumah | | |
| 4 | 04/11/2025 | Dinkominfo Kab | Dinkominfo Prov | EMAIL SANAPATI | 07,16 | 07,26 | STAF SANDI | 3 Hal | 500.3.2/25/DESD/04/01/2025 | 31/03/2025 | Dinkominfo Kab | Dinkominfo Prov | Perencanaan Api Service | | |
| 5 | 04/11/2025 | BUPATI | Kemendagri | EMAIL SANAPATI | 17,22 | 17,32 | STAF SANDI | 1 Hal | 700.1.1.5/74/20/SPSLM | 31/04/2025 | BUPATI | Kemendagri | Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi sebagai Komponen | | |

Gb 3.70

Laporan bulanan rekapitulasi penerimaan dan pengiriman berita Persandian

Penyelenggaraan Persandian di Dinkominfo Kabupaten Temanggung melahirkan "Ekosistem digital yang terpercaya". Dengan output ini, Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak hanya sekadar menjalankan teknologi informasi, tetapi menjamin bahwa seluruh data dan layanan digital yang digunakan oleh masyarakat berada dalam lingkungan sistem keamanan yang tangguh dan sesuai standar nasional.

B. Realisasi Anggaran

1. Laporan Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan Dinkominfo Kabupaten Temanggung berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.31 berikut:

Tabel 3.31
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | Persentase | |
|----------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|---------------------|
| | | | | | Serapan | Per Pos Anggaran |
| 1 | Belanja Operasional | 9.194.580.352 | 8.014.428.147 | 1.180.152.205 | | 88% |
| | Belanja Pegawai | 4.219.434.002 | 3.986.590.998 | 232.843.004 | 94% | |
| | Belanja Barang dan Jasa | 4.975.146.350 | 4.027.837.149 | 947.309.201 | 81% | |
| 2 | Belanja Modal | 49.819.600 | 48.360.000 | 1.459.600 | | 97% |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 49.819.600 | 48.360.000 | 1.459.600 | 97% | |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Belanja Transfer | 0 | 0 | 0 | | 0% |
| | Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | Total Belanja Daerah | 9.244.399.952 | 8.062.788.147 | 1.181.611.805 | 87% | |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2025 untuk total belanja sebesar Rp 8.062.788.147,- dari total anggaran sebesar Rp 9.244.399.952,- atau 87% dari anggaran yang ditetapkan.

Jika dilihat dari uraian belanja per pos anggaran terlihat bahwa belanja operasional mendapati porsi yang paling banyak yaitu sebesar 99,46% kemudian porsi kedua belanja modal sebesar 0,54% sementara pos belanja transfer 0% karena tidak ada alokasi belanja transfer.

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per program di Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.32
Capaian Indikator Program dari sisi anggaran

| No | Program/Kegiatan | DPA (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Kategori |
|----|---|----------------------|----------------------|---------------|----------|
| 1 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 559.768.450 | 549.157.048 | 98,10% | |
| 2 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 1.129.479.500 | 1.128.530.765 | 99,92% | |
| 3 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 9.901.500 | 9.470.999 | 95,65% | |
| 4 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 374.880.000 | 356.144.001 | 95,00% | |
| 5 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 7.170.370.502 | 6.266.864.234 | 87,40% | |
| | Jumlah | 9.244.399.952 | 8.310.167.047 | 89,89% | |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penyerapan anggaran untuk capaian indikator program sebesar 89,89%. Pencapaian target kinerja Dinkominfo pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp. 9.244.399.952,- dengan realisasi Rp. 8.310.167.047,- sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 934.232.905,- atau 10,11%.

Efisiensi sumber daya tercatat sebesar 10,11%, sementara capaian kinerja sebesar 99,98% dengan realisasi anggaran sebesar 89,89%. Kondisi ini menunjukkan bahwa target kinerja dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat, sehingga memperoleh interpretasi kinerja **SANGAT MEMUASKAN**.

Pencapaian target pada program dan efisiensi anggaran per program dijelaskan sebagai berikut:

a. Pencapaian target Kinerja Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Dengan pagu anggaran sebesar Rp 559.768.450,- dan realisasi senilai Rp. 549.157.048 (98,10%) terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 10.611.402,- atau 1,90%. Efisiensi sumber daya pada Program Informasi dan Komunikasi Publik sebesar 1,84%, ditunjukkan oleh capaian kinerja 99,94% dengan realisasi anggaran 98,10%.

b. Pencapaian target Kinerja Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.129.479.500,- dan realisasi sebesar Rp. 1.128.530.765,- (99,92%) terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 948.735,- atau 0,08%. Efisiensi sumber daya pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar 0,08%, ditunjukkan oleh capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 99,92%.

c. Pencapaian target Kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.901.500,- dan realisasi sebesar Rp. 9.470.999,- (95,65%) terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 430.501,- atau 4,35%. Efisiensi sumber daya pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebesar 4,35%, ditunjukkan oleh capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 95,65%.

d. Pencapaian target Kinerja Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 374.880.000,- dan realisasi sebesar Rp. 356.144.001,- (95%) terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 18.735.999,- atau 5%. Efisiensi sumber daya pada Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi sebesar 5%, ditunjukkan oleh capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 95,00%.

e. Pencapaian target Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.170.370.502,- dan realisasi sebesar Rp. 6.266.864.234,- (87,40%) terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.

903.506.268,- atau 12,60%. Efisiensi sumber daya pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 12,60%, ditunjukkan oleh capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 87,40%.

C. Prestasi Dan Penghargaan

Prestasi dan penghargaan yang diraih Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Best Improvement Menuju Smart City, Implementasi Program Smart City Tahun 2025 dari Kementerian Komunikasi Digital Republik Indonesia.
2. Kategori *"Informatif"* Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
3. Juara III Lomba Pertunjukan FK Metra Tahun 2025 Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
4. Juara Harapan III kategori Film Pendek Program Diseminasi Informasi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
5. KPID Award 2025 sebagai LPPL dengan Kelembagaan Terbaik. dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah.



Gb 3.71

Bupati Temanggung menerima penghargaan dalam ajang "Smart City Award" Tahun 2025 dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Republik Indonesia di Yogyakarta, tanggal 26/8/2025



Gb 3.72
Piagam Penghargaan “Smart City Award” Tahun 2025



Gb. 3.73
Penerimaan Penghargaan KIP Award Tahun 2025



Gb. 3.74
Penerimaan Penghargaan Lomba Pertunjukan FK Metra Tahun 2025
Tingkat Provinsi Jawa Tengah



Gb. 3.75
Piagam Penghargaan Lomba Pertunjukan FK Metra Tahun 2025



Gb. 3.76
Penghargaan Juara Harapan III kategori Film Pendek Program Diseminasi Informasi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)



Gb 3.77
KPID Award 2025 sebagai LPPL dengan Kelembagaan Terbaik. dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinkominfo Kabupaten Temanggung disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025, sekaligus sebagai instrumen transparansi publik atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Laporan ini menyajikan potret riil mengenai efektivitas penggunaan anggaran, pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), serta sejauh mana program kerja yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat di era transformasi digital.

Sebagai tahun pertama implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, LKjIP ini menjadi pijakan strategis untuk mengevaluasi akselerasi visi “Temanggung untuk Semua (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif, dan Aman)”. Seluruh data, analisis, dan evaluasi yang tertuang dalam laporan ini diposisikan sebagai bahan pengambilan keputusan strategis dalam perencanaan tahun berikutnya. Dengan mengidentifikasi hambatan teknis maupun manajerial yang muncul sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat merumuskan langkah perbaikan yang lebih presisi, inovatif, dan adaptif terhadap dinamika teknologi informasi yang terus berkembang.

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini merupakan potret komprehensif atas dedikasi Dinkominfo Kabupaten Temanggung dalam mengawal transformasi digital di Bumi Phala. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2025 telah berjalan secara efektif dan efisien, dengan realisasi capaian indikator kinerja yang sebagian besar melampaui target rata-rata. Pencapaian ini ditandai dengan penguatan fundamental terhadap setidaknya empat pilar utama:

1. Tata Kelola Pemerintahan Digital: Peningkatan nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencerminkan integrasi layanan publik yang lebih ramping dan bebas sekat birokrasi.

2. Keterbukaan Informasi Publik: Keberhasilan mempertahankan predikat Kabupaten Informatif melalui penguatan fungsi PPID dan optimalisasi diseminasi informasi hingga ke tingkat akar rumput.
3. Kedaulatan Data: Penguatan ekosistem "Satu Data Temanggung" yang kini telah menjadi kompas utama dalam proses pengambilan kebijakan berbasis data (*data-driven policy*) oleh pimpinan daerah.
4. Ketahanan Infrastruktur TIK: Perluasan jaringan fiber optik dan penyediaan akses internet di wilayah *blank spot* yang secara langsung telah memicu geliat ekonomi digital di pedesaan melalui program *Smart Village*.

Capaian-capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan manifestasi dari komitmen Dinkominfo dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel kepada seluruh masyarakat Temanggung.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Menyadari bahwa tantangan teknologi informasi di masa depan bersifat eksponensial dan dinamis, Dinkominfo telah merumuskan peta jalan strategis untuk memastikan keberlanjutan kinerja pada periode mendatang:

1. Transformasi Keamanan Informasi: Seiring dengan meningkatnya ancaman siber, strategi ke depan akan berfokus pada penguatan aspek persandian dan keamanan informasi. Hal ini mencakup penerapan *Zero Trust Architecture* pada server pemerintah dan peningkatan literasi keamanan digital bagi seluruh ASN untuk meminimalisir risiko kebocoran data.
2. Adopsi Teknologi Masa Depan: Dinkominfo berkomitmen untuk mulai mengintegrasikan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam analisis data publik dan layanan *chatbot* pemerintahan guna meningkatkan efisiensi respon terhadap keluhan masyarakat secara *real-time*.
3. Sinergi Lintas Sektor: Memperkuat kolaborasi *dengan* melibatkan akademisi, pelaku bisnis, komunitas, dan media untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif. Strategi ini bertujuan agar digitalisasi tidak hanya berhenti pada level administratif pemerintahan, tetapi juga merambah pada pemberdayaan UMKM digital dan literasi masyarakat cerdas informasi.
4. Optimalisasi Belanja Teknologi yang Akuntabel: Ke depan, fokus efisiensi anggaran akan diarahkan pada penggunaan perangkat lunak berbagi pakai (*shared services*) dan infrastruktur *cloud* guna menghindari duplikasi anggaran

serta memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki dampak sosial ekonomi yang nyata.

Seluruh keberhasilan yang tertuang dalam LKjIP 2025 ini diharapkan menjadi pijakan kokoh bagi langkah pembangunan tahun-tahun selanjutnya. Segala kekurangan dan hambatan yang ditemui sepanjang tahun ini telah diidentifikasi secara seksama sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.

Dinkominfo Kabupaten Temanggung berkomitmen akan terus bergerak dinamis, berinovasi, dan senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pusat dari setiap pengembangan teknologi, demi terwujudnya Kabupaten Temanggung yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing di era digital.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Dinkominfo Kabupaten Temanggung, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Temanggung, Februari 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung



Gotrid Wijiarto Wuriatmojo, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197712121997031006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216
Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995
Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP. M.Si.

Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS SETYAWAN, SE

Jabatan : BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
BUPATI TEMANGGUNG,

Pihak Pertama
KEPALA DINKOMINFO
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SETYAWAN, SE

GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG

| NO | TUJUAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN |
|-----|--|--|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik berbasis teknologi informasi | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3,70 | Nilai |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN |
|-----|--|--|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3,70 | Nilai |
| 2 | Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3,20 | Nilai |
| 3 | Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah | Nilai keterbukaan informasi publik | 96,00 | Nilai |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publi | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah | 79,9 | Nilai |
| | | Nilai AKIP Perangkat Daerah | 74,20 | Nilai |

| PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
|---|-------------------|------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Rp. 7.170.370.502 | APBD |
| 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Rp. 559.768.450 | APBD |
| 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Rp. 1.129.479.500 | APBD |
| 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Rp. 9.901.500 | APBD |
| 5. Program Penyelenggaraan Persandiaan untuk Pengamanan Informasi | Rp. 374.880.000 | APBD |

Temanggung, 1 Oktober 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI TEMANGGUNG,

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINKOMINFO
KABUPATEN TEMANGGUNG,



AGUS SETYAWAN, SE



GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

**CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2025-2029 KABUPATEN TEMANGGUNG
S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025**

PERANGKAT DAERAH : DINKOMINFO

| No | Program | No | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Akhir 2024 | Target Kinerja | | | | | Realisasi Kinerja | | | | | Capaian s.d TW IV 2025 | Skala Nilai Peringkat Kinerja | | | | | | | |
|--|---------|----|--|----------|--|----------------|-------|------|-------|------|-------------------|-------|------|------|------|------------------------|-------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | ST | T | S | R | SR | | |
| INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASPEK DAYA SAING | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Persentase rumah tangga dengan akses internet | % | 90,52 | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94,24 | | | | | 100,00 | V | | | | | | |
| ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks | 3,64 | 3,7 | 3,75 | 3,8 | 3,85 | 3,9 | 4,0 | 3,80 | | | | | 100,00 | V | | | | | | |
| | | 3 | Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | nilai | 4,46 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,75 | 4,8 | 4,9 | 4,39 | | | | | 97,56 | V | | | | | | |
| | | 4 | Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | nilai | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,50 | | | | | 100,00 | V | | | | | | |
| | | 5 | Nilai keterbukaan informasi publik | nilai | 95,86 | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 | 91,34 | | | | | 95,15 | V | | | | | | |
| JUMLAH INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) | | | | 5 | RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKD | | | | | | | | | | | | | 98,54 | | | | | | |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Nilai IKM Perangkat Daerah | Angka | n.a. | 79,9 | 82,3 | 83,3 | 84,3 | 85,3 | 86,3 | 88,59 | | | | | 100,00 | V | | | | | | |
| | | 2 | Nilai AKIP Perangkat Daerah | Angka | 71,5 | 74,2 | 75,25 | 75,5 | 75,75 | 76 | 76,25 | 74,20 | | | | | 100,00 | V | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Nilai | 3,64 | 3,7 | 3,75 | 3,8 | 3,85 | 3,9 | 4 | 3,80 | | | | | 100,00 | V | | | | | | |
| | | 2 | Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Nilai | 4,46 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,75 | 4,8 | 4,9 | 4,39 | | | | | 97,56 | V | | | | | | |
| | | 3 | Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | nilai | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,50 | | | | | 100,00 | V | | | | | | |
| | | 4 | Nilai keterbukaan informasi publik | nilai | 95,86 | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 | 91,34 | | | | | 95,15 | V | | | | | | |
| JUMLAH INDIKATOR (IKUPD) | | | | 6 | RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKD | | | | | | | | | | | | | 98,78 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No | Program | No | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Akhir 2024 | Target Kinerja | | | | | Realisasi Kinerja | | | | | Capaian s.d TW IV 2025 | Skala Nilai Peringkat Kinerja | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|-------------------|--------|--|--|-------|-------|------|-------|-------------------|------|------|------|-------|------------------------|-------------------------------|----|---|---|---|----|--|--|--|--|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | ST | T | S | R | SR | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDIKATOR PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | 1 | Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif | % | 85,29 | 85,5 | 85,75 | 86 | 86,25 | 86,5 | 86,75 | 85,29 | | | | | 99,76 | V | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Lembaga binaan dan mitra diseminasi Dinkominfo yang aktif | | | | | | | | | 87 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Lembaga binaan dan mitra diseminasi Dinkominfo | | | | | | | | | 102 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 556,30 | | | | | 100,00 | V | | | | | | | | | |
| | | Jumlah konten diseminasi informasi yang disampaikan | | | | | | | | | 8122 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah target konten diseminasi informasi yang disampaikan | | | | | | | | | 1460 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo | % | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | | | | | 100,00 | V | | | | | | | | | |
| | | Jumlah laporan dan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah laporan dan aduan masyarakat | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Persentase Badan Publik yang memenuhi | % | n.a | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 25 | 28,74 | | | | | 100,00 | V | | | | | | | | | |
| | | Badan Publik yang melaksanakan update data dan informasi pada dashboard PPID Badan Publik | | | | | | | | | 98 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Badan Publik PPID Pemkab Temanggung yang ditetapkan | | | | | | | | | 341 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 5 | Persentase layanan publik secara elektronik | % | 50,38 | 55 | 75 | 85 | 95 | 100 | 100 | 55,73 | | | | | 100,00 | V | | | | | | | | | |
| | | Jumlah layanan publik elektronik | | | | | | | | | 73 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah layanan publik yang ditetapkan di lingkungan Pemerintah kabupaten Temanggung | | | | | | | | | 131 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik | % | 100 | 100 | 37,68 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | | | | | 100,00 | V | | | | | | | | | |
| | | Jumlah OPD dengan infrastruktur TIK yang berfungsi/bisa dipakai | | | | | | | | | 46 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah OPD yang terfasilitasi infrastruktur TIK | | | | | | | | | 46 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Persentase rumah tangga dengan akses internet | % | 90,52 | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94,24 | | | | | 100,00 | V | | | | | | | | | |
| | | Jumlah rumah tangga yang menggunakan internet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah rumah tangga di Kabupaten Temanggung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH INDIKATOR PROGRAM | | | | 6 | RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM | | | | | | | | | | 99,96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| JUMLAH INDIKATOR BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | 6 | RATA-RATA CAPAIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | | 99,96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| No | Program | No | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Akhir 2024 | Target Kinerja | | | | | Realisasi Kinerja | | | | | Capaian s.d TW IV 2025 | Skala Nilai Peringkat Kinerja | | | | | | | | | |
|--|---|----|---|---|--------------------|----------------|------|------|------|------|-------------------|------|--------|------|--|--|-------------------------------|--------|---|---|--------|--------|---|---|---|---|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | ST | T | S | R | SR | | | | |
| INDIKATOR PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 1 | Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI) | angka | 39,32 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 73,6 | | | | | 100,00 | V | | | | | | | | |
| | | 2 | Ketersediaan data statistik sektoral | % | 100 | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | | | | | 100,00 | V | | | | | | | |
| | | | | Jumlah data statistik sektoral dan data geospasial yang datanya dikelola Dinkominfo | | | | | | | | | 314 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah data prioritas Kabupaten Temanggung | | | | | | | | | 314 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | JUMLAH INDIKATOR PROGRAM | | | | | | | | | | | 2 | RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM | | | | | | 100,00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | | JUMLAH INDIKATOR BIDANG STATISTIK | | | | | | | | | | | 2 | RATA-RATA CAPAIAN BIDANG STATISTIK | | | | | | 100,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIKATOR PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 1 | Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah | Angka | 87,67 | 600 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 548 | | | | | 91,33 | V | | | | | | | | |
| | | 2 | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | | | | | 100,00 | V | | | | | | | |
| | | | | Jumlah aplikasi yang sudah dilakukan VA | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah target aplikasi yang akan dilaksanakan | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | JUMLAH INDIKATOR PROGRAM | | | | | | | | | | | 1 | RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM | | | | | | 95,67 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | | JUMLAH INDIKATOR BIDANG PERSANDIAN | | | | | | | | | | | 2 | RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | 95,67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | JUMLAH TOTAL IKUPD | | | | | | | | | | | 6 | RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD | | | | | | 98,78 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | JUMLAH TOTAL INDIKATOR PROGRAM | | | | | | | | | | | 10 | RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM | | | | | | 98,54 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | JUMLAH INDIKATOR DINKOMINFO | | | | | | | | | | | 16 | RATA-RATA CAPAIAN DINKOMINFO | | | | | | 98,54 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kriteria Penilaian Realisasi |
|------------------------------|
| Sangat Tinggi |
| Tinggi |
| Sedang |
| Rendah |
| Sangat Rendah |

| Status |
|------------|
| 91% ≤ 100% |
| 76% ≤ 90% |
| 66% ≤ 75% |
| 51% ≤ 65% |
| ≤ 50% |

Temanggung, 31 Desember 2025
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTO WILHANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 197712121997031006

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
EVALUASI HASIL RKPD
TAHUN 2025

Triwulan : 4

Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

| No | Bidang / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan | Target Akhir Renstra 2029 | | Realisasi s/d 2024 | | Target 2025 | | | Realisasi Per Triwulan Tahun 2025 | | | | | | | | Realisasi 2025 | | Capaian 2025 | | Realisasi s/d 2025 | | Capaian s/d 2025 | | Ket. |
|----|---|--|--------------|---------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|---------------|--------------|-------|--------------------|---------------|------------------|--------------|------|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp (Renja) | Rp (DPA) | I | | II | | III | | IV | | K | Rp | K | Rp | K | Rp. | K | Rp. | |
| | | | | 5,00 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 (7+20) | 25 (8+21) | 26 (24/5*10) | 27 (25/6*10) | |
| | BELANJA DAERAH | | | 43.960.609.208 | | 9.605.668.035 | | 9.383.870.825 | 9.244.399.952 | | 1.759.568.212 | | 1.754.973.195 | | 2.146.711.671 | | 1.336.903.473 | | 8.310.167.047 | | 89,89 | | 3.774.419.001 | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | 32.561.580.733 | | 4.763.275.309 | | 7.444.841.375 | 7.170.370.502 | | 1.551.533.512 | | 1.345.610.735 | | 1.408.571.514 | | 1.336.903.473 | | 6.266.864.234 | | 87,40 | | 2.280.273.236 | | | | |
| | | Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU) | % | 100 | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 18.323.272.996 | | 3.888.781.910 | | 4.435.092.875 | 4.219.434.002 | | 1.064.920.533 | | 1.042.084.560 | | 969.444.868 | | 910.141.037 | | 3.986.590.998 | | 94,48 | | | | | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/ Bulan | 200 | 18.323.272.996 | 33 | 3.888.781.910 | 40 | 4.435.092.875 | 4.219.434.002 | 35 | 1.064.920.533 | 40 | 1.042.084.560 | 40 | 969.444.868 | 40 | 910.141.037 | 40 | 3.986.590.998 | 100 | 94,48 | 40 | 3.986.590.998 | 20,00 | 21,76 | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tunjangan ASN | | | 3.725.045.000 | | 596.130.489 | | 745.009.000 | 745.009.000 | | 1.128.000 | | 5.463.000 | | 82.256.000 | | | | 713.092.000 | | 95,72 | | 713.092.000 | | | |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi | Orang/ Bulan | 35.000 | 3.725.045.000 | 5020 | 596.130.489 | 7000 | 745.009.000 | 745.009.000 | - | 1.128.000 | - | 5.463.000 | 5.000 | 82.256.000 | 2.000 | 624.245.000 | 7.000 | 713.092.000 | 0 | 95,72 | 7.000 | 713.092.000 | 20 | 19,14 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Peraturan Perundang-undangan | | | 1.078.771.100 | | 119.045.850 | | 112.752.100 | 112.752.100 | | 4.200.297 | | 49.319.000 | | 17.367.600 | | 32.358.650 | | 103.245.547 | | 91,57 | | 103.245.547 | | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | paket | 28 | 27.165.500 | 5 | 4.995.500 | 5 | 3.482.000 | 3.482.000 | - | - | - | - | 5 | 1.686.000 | | 1.750.000 | 5 | 3.436.000 | 100 | 98,68 | 5 | 3.436.000 | 18 | 12,65 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | paket | 21 | 428.891.600 | 3 | 27.250.000 | 3 | 49.819.600 | 49.819.600 | - | - | 3 | 48.360.000 | | - | | - | 3 | 48.360.000 | 100 | 97,07 | 3 | 48.360.000 | 14 | 11,28 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | paket | 22 | 119.811.000 | 12 | 15.797.000 | 12 | 11.599.000 | 11.599.000 | - | - | 6 | 450.000 | 3 | 5.049.600 | 3 | 5.882.000 | 12 | 11.381.600 | 100 | 100 | 12 | 11.381.600 | 55 | 9,50 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | paket | 60 | 51.732.000 | 12 | 9.356.850 | 12 | 5.700.000 | 5.700.000 | - | - | 6 | 509.000 | 3 | 1.861.000 | 3 | 3.328.400 | 12 | 5.698.400 | 100 | 99,97 | 12 | 5.698.400 | 20 | 11,02 | |
| | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | laporan | 60 | 152.384.000 | 12 | 27.960.000 | 12 | 25.182.000 | 25.182.000 | 3 | 810.000 | 3 | - | 3 | 1.260.000 | 3 | 16.333.500 | 12 | 18.403.500 | 100 | 73,08 | 12 | 18.403.500 | 20 | 12,08 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 60 | 298.787.000 | 36 | 33.686.500 | 12 | 16.969.500 | 16.969.500 | 3 | 3.390.297 | 3 | - | 3 | 7.511.000 | 3 | 5.064.750 | 12 | 15.966.047 | 100 | 94,09 | 12 | 15.966.047 | 20 | 5,34 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 8.840.070.637 | | 93.064.864 | | 2.088.516.400 | 2.029.704.400 | | 476.375.223 | | 242.242.175 | | 322.210.136 | | 362.856.955 | | 1.403.684.489 | | 69,16 | | 1.403.684.489 | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jas Surat menyurat | laporan | 60 | 3.045.600 | 36 | 2.136.000 | 12 | 1.855.000 | 1.855.000 | 3 | - | 3 | - | 3 | 560.000 | 3 | | 12 | 560.000 | 100 | 30,19 | 12 | 560.000 | 20 | 18,39 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | 60 | 38.121.000 | 12 | 5.826.060 | 12 | 7.000.000 | 7.000.000 | 3 | 1.328.355 | 3 | 1.326.633 | 3 | 1.331.238 | 3 | 1.326.503 | 12 | 5.312.729 | 100 | 75,90 | 12 | 5.312.729 | 20 | 13,94 | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | 60 | 76.288.800 | 24 | 11.440.000 | 12 | 11.422.400 | 11.422.400 | 3 | - | 3 | 1.735.000 | 3 | 1.250.000 | 3 | 7.671.000 | 12 | 10.656.000 | 100 | 93,29 | 12 | 10.656.000 | 20 | 13,97 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | laporan | 60 | 8.722.615.237 | 12 | 73.663.804 | 12 | 2.068.239.000 | 2.009.427.000 | 3 | 475.046.868 | 3 | 239.180.542 | 3 | 319.068.898 | 3 | 353.859.452 | 12 | 1.387.155.760 | 100 | 69,03 | 12 | 1.387.155.760 | 20 | 15,90 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 594.421.000 | | 66.252.196 | | 63.471.000 | 63.471.000 | | 4.909.459 | | 6.502.000 | | 17.292.910 | | 31.546.831 | | 60.251.200 | | 94,93 | | 60.251.200 | | | |

| No | Bidang / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Satuan | Target Akhir Renstra 2029 | | Realisasi s/d 2024 | | Target 2025 | | | Realisasi Per Triwulan Tahun 2025 | | | | | | | | Realisasi 2025 | | Capaian 2025 | | Realisasi s/d 2025 | | Capaian s/d 2025 | | Ket. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------|---------------------------|----------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|----|----|---------------|-----|---------------|-----|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|-----------|------------------|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp (Renja) | Rp (DPA) | I | | II | | III | | IV | | K | Rp | K | Rp | K | Rp. | K | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5,00 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 (7+20) | 25 (8+21) | 26 (24/5*10) | 27 (25/6*10) | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.20.0 | Penyelenggaraan Statistik | | | | 152.502.063 | | 98.338.777 | | 9.901.500 | 9.901.500 | | | | | | 6.142.499 | | | | 9.470.999 | | 95,65 | | | 9.470.999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.20.01 | Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.20.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata | Dok | 25 | 152.502.063 | 5 | 98.338.777 | 5 | 9.901.500 | 9.901.500 | | | | | 5 | 6.142.499 | | 3.328.500 | 5 | 9.470.999 | 100 | 95,65 | 5 | 9.470.999 | 20,00 | 6,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 2.20.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | 1.702.937.669 | | 110.569.037 | | 374.880.000 | 374.880.000 | | | | 500.000 | | 355.344.001 | | | | 356.144.001 | | 95,00 | | | 356.144.001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah | Angka | 360 | | | | 300 | | | 0 | | 0 | | 263 | | 548 | | 548 | | 100 | | 548 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah | % | 100 | | | | 100 | | | 0 | | 0 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.21.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1.702.937.669 | | 110.569.037 | | 374.880.000 | 374.880.000 | | | | 500.000 | | 355.344.001 | | | | 356.144.001 | | 95,00 | | | 356.144.001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Laporan | 60 | 1.500.000.000 | 12 | 81.226.887 | 12 | 350.000.000 | 350.000.000 | 3 | | 3 | | 3 | 348.080.001 | | 3 | | 12 | 348.080.001 | 100 | 99,45 | 12 | 348.080.001 | 20,00 | 23,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.21.04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | PD | 230 | 202.937.669 | 12 | 29.342.150 | 46 | 24.880.000 | 24.880.000 | 46 | | 46 | 500.000 | 46 | 7.264.000 | 46 | 300.000 | 46 | 8.064.000 | 100 | 32,41 | 46 | 8.064.000 | 20,00 | 3,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 2.21.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | 43.960.609.208 | | 9.605.668.035 | | 9.383.870.825 | 9.244.399.952 | | | | 1.759.568.212 | | 1.754.973.195 | | | | 2.146.711.671 | | 1.336.903.473 | | | 8.310.167.047 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98,46 | 89,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREDIKAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95,85 | | | |
| PREDIKAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja

Faktor penghambat pencapaian kinerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun anggaran berikutnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya



**PRESTASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025**

| NO | NAMA PENGHARGAAN | PEMBERI PENGHARGAAN | KETERANGAN |
|----|--|--|------------------------|
| 1 | Best Improvement Menuju Smart City, Implementasi Program Smart City Tahun 2025 | Kementerian Komunikasi Digital Republik Indonesia | |
| 2 | Kategori " <i>Informatif</i> " Peningkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 | Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Tengah | |
| 3 | Juara III Lomba Pertunjukan FK Metra Tahun 2025 Tingkat Provinsi Jawa Tengah | Pemprov Jawa Tengah | Dinkominfo Prov Jateng |
| 4 | Juara Harapan III kategori Film Pendek Program Diseminasi Informasi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 | Pemprov Jawa Tengah | Dinkominfo Prov Jateng |
| 5 | KPID Award 2025 sebagai LPPL dengan Kelembagaan Terbaik | Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah | |

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG
TRIWULAN IV

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Target Kinerja (%) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator | Target Kegiatan | Anggaran | Realisasi | | | | Realisasi 2025 | Capaian (%) | Ket. | |
|--|--|--|--------------------|--|--|-----------------|---------------|-----------|--------|--------|-------|----------------|-------------|------|--|
| | | | | | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah | Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU) | 100 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 7.170.370.502 | | | | | | | | |
| | | | | | Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU) | 100 % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 100 % | 4.219.434.002 | | | | | | | | |
| | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 40 Org | 4.219.434.002 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tunjangan ASN | 100 % | 745.009.000 | | | | | | | | |
| | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan | 7000 Org | 745.009.000 | - | - | 5.000 | 2.000 | 7.000 | 100 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Peraturan Perundang-Undangan | 100 % | 112.752.100 | | | | | | | | |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5 paket | 3.482.000 | - | - | 5 | | 5 | 100 | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor | 3 paket | 49.819.600 | - | 2 | - | - | 2 | 67 | | |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor | 12 paket | 11.599.000 | - | 6 | 3 | 3 | 12 | 100 | | |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan | 12 paket | 5.700.000 | - | 6 | 3 | 3 | 12 | 100 | | |
| | | | | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 12 laporan | 25.182.000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100 | | |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan Rapat dan Koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 laporan | 16.969.500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100 | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 % | 2.029.704.400 | | | | | | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan | 12 laporan | 1.855.000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100 | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 12 laporan | 7.000.000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100 | | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 12 laporan | 11.422.400 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100 | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 12 laporan | 2.009.427.000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100 | | | | | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 63.471.000 | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 25 unit | 63.471.000 | 5 | 4 | 9 | 7 | 25 | 100 | | | | | | |
| 2 | Meningkatnya keterbukaan informasi publik | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | 90,15 | Program Informasi dan Komunikasi Publik | | | 559.768.450 | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif | 85,5 % | | 85,29 | 85,25 | 85 | 85 | 85,29 | 100,00 | | |
| | | | | | Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik | 100 % | | 21,14 | 295,55 | 100 | 556 | 556,30 | 556,30 | | |
| | | | | | Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo | 90 % | | 100 | 100 | 85 | 100 | 100,00 | 100 | | |
| | | | | | Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik | 15 % | | - | - | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 100 | | |

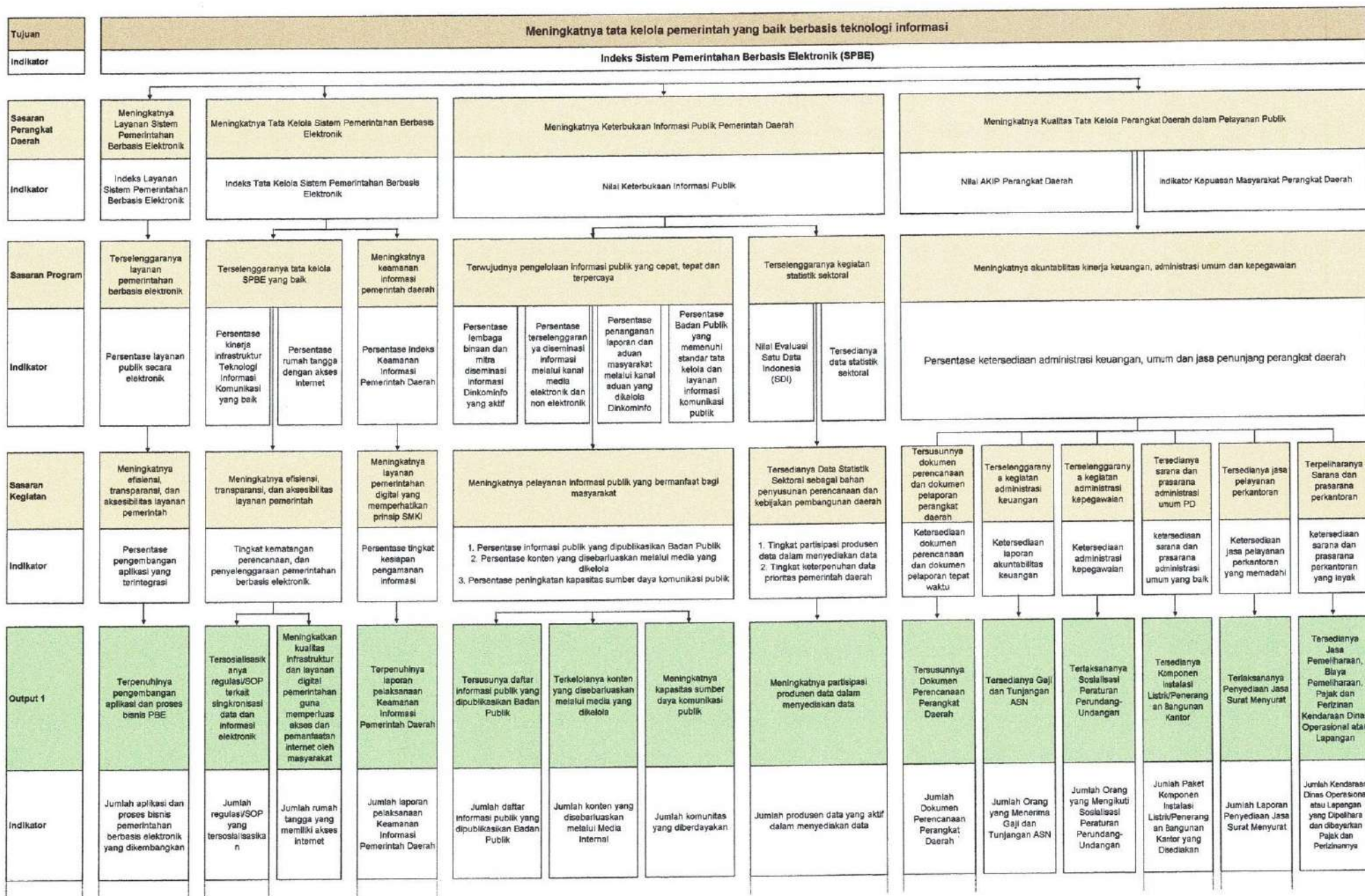
| No | Sasaran Strategis | Indikator | Target Kinerja (%) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator | Target Kegiatan | Anggaran | Realisasi | | | | Realisasi 2025 | Capaian (%) | Ket. | |
|------------------------|--|--|--------------------|--|---|-----------------|---------------|----------------------|-------|--------|--------|----------------|-------------|------|--|
| | | | | | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | 100 % | 559.768.450 | | | | | | | | |
| | | | | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 12 dok. | 559.768.450 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100 | | |
| | | | | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | | | 9.901.500 | | | | | | | | |
| | | | | | Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI) | 40 Angka | | | | 39,32 | 73,60 | 73,60 | 184,00 | | |
| | | | | | Ketersediaan data statistik sektoral | 74 % | | 74,20 | 74,20 | 82,48 | 100,00 | 100,00 | 135,14 | | |
| | | | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Presentase Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 9.901.500 | | | | | | | | |
| | | | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | Jumlah dokumen Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | 5 dok. | 9.901.500 | - | - | 5 | - | 5 | 100 | | |
| 3 | Meningkatnya kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3,35 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | | | 1.129.479.500 | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase layanan publik secara elektronik | 55 % | | 51,91 | 52,67 | 53 | 56 | 56 | 101 | | |
| | | | | | Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik | 100 % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | | | | | Persentase rumah tangga dengan akses internet | 91 % | | 51,91 | 52,67 | 91 | 94 | 94 | 103,56 | | |
| | | | | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung | 100 % | 1.129.479.500 | | | | | | | | |
| | | | | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | 46 PD | 1.129.479.500 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 100 | | |
| | | | | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | | | 374.880.000 | | | | | | | | |
| | | | | | Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah | 300 Angka | | - | - | 263 | 548 | 548 | 182,67 | | |
| | | | | | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah | 100 % | | - | - | | 100 | 100 | 100,00 | | |
| | | | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Presentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab. Temanggung | | 374.880.000 | | | | | | | | |
| | | | | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 12 laporan | 350.000.000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100 | | |
| | | | | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi | 46 PD | 24.880.000 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 100 | | |
| JUMLAH ANGGARAN | | | | | | | | 9.244.399.952 | | | | | | | |

Temanggung, 31 Desember 2025
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Temanggung



Gion Wijanto Wuriatmojo, S.STP, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 197712121997031006

POHON KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG



| | | | | | | | |
|-----------|---|---|--|---|--|---|--|
| Output 2 | Meningkatnya OPD yang mengimplementasikan inisiatif smart city sesuai masterplan smart city | Terpenuhinya kapasitas bandwidth jaringan intra pemerintah daerah | Terpenuhinya layanan keamanan informasi bagi perangkat daerah | Terpenuhinya data prioritas pemerintah daerah | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| Indikator | Jumlah OPD/instansi yang mengimplementasikan smart city sesuai masterplan smart city | Jumlah kapasitas bandwidth (Mbps) | Jumlah Perangkat Daerah telah menggunakan layanan Keamanan Informasi | Jumlah data prioritas yang tersedia | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |
| Output 3 | | Terkelolanya sarana prasarana data center | | | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor |
| Indikator | | Jumlah server yang berfungsi optimal | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |
| Output 4 | | | | | | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| Indikator | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |
| Output 5 | | | | | | Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan | |
| Indikator | | | | | | Jumlah paket barang cetskan dan pengandaan yang disediakan | |
| Output 6 | | | | | | Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu | |
| Indikator | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | |
| Output 7 | | | | | | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| Indikator | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |

